

**ANALISIS LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA PADA
DINAS PARIWISATA DAN SENI BUDAYA
KABUPATEN OKU TIMUR**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Salah
Satu Persyaratan Memperoleh
Gelar Sarjana Ekonomi**



Nama : Padla Aulia Hadiyanti

NIM : 22 2011 170

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
2017**

PERNYATAAN BEBAS PLAGIAT

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Padla Aulia Hadiyanti

NIM : 22 2011 170

Jurusan : Akuntansi

Menyatakan bahwa skripsi ini telah ditulis sendiri dengan sungguh-sungguh dan tidak ada bagian yang merupakan penjiplakan karya orang lain.

Apabila di kemudian hari terbukti bahwa pernyataan ini tidak benar, maka saya sanggup menerima sanksi apapun sesuai peraturan yang berlaku.

Palembang, Februari 2017

Penulis



(Padla Aulia Hadiyanti)

Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Muhammadiyah
Palembang

TANDA PENGESAHAN SKRIPSI

JUDUL : Analisis Laporan Akuntabilitas Kinerja Pada
Dinas Pariwisata Dan Seni Budaya
Kabupaten Oku Timur

Nama : Padla Aulia Hadiyanti
NIM : 22 2011 170
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis
Program Studi : Akuntansi
Mata Kuliah Pokok : Akuntansi Sektor Publik

Diterima dan disahkan
Pada tanggal,

Pembimbing



Muhammad Fahmi, S.E., M.Si
NIDN/NBM : 0029097804

**Mengetahui
Dekan**

U.b. Ketua Program Studi Akuntansi



Betri Sirajuddin, S.E., M.Si., Ak., CA
NIDN/NBM : 0269101502/944806

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

MOTTO:

- Jadikanlah sabar dan do'a sebagai penuntunmu.
- Janganlah takut untuk melangkah, karena jarak 1000 mil dimulai dengan langkah pertama.
- Kesuksesan hanya dapat diraih dengan segala upaya dan usaha yang disertai dengan doa, karena sesungguhnya nasib seseorang manusia tidak akan berubah dengan sendirinya tanpa berusaha....

(Padla Aulia Hadiyanti)

Skripsi iniku persembahkan kepada :

- *Sang Pencipta , Allah SWT*
- *Papa dan mama yang tercinta (Ali&Cekma)*
- *Ayuk dan keponakanyang tercinta (mimi, tika, indah, dzakir, ayyash, nindi)*
- *Nur Seli Anggraina dan Romodhon*
- *Sahabatku (Renny Ratna Rahim, Ely sartika, Dyah Puji Asri)*
- *Pembimbing skripsiku, dandosen-dosen FEB UMP*
- *Keluargaku yang aku sayangi*

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PRAKATA

Assalamu' alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Alhamdulillah rabbilalamin, dengan memanjatkan puji dan syukur atas kehadiran Allah S.W.T. yang telah memberikan rahmat, dan hidayahNya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul "Analisis Laporan Akuntabilitas Kinerja Pada Dinas Pariwisata dan Seni Budaya Kabupaten OKU Timur" tepat pada waktunya. Skripsi ini merupakan salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi Strata Satu (S1) pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Palembang.

Ucapan terima kasih yang sangat tulus penulis sampaikan kepada kedua orang tuaku, yaitu Papa dan Mama (Kgs.M.Ali dan Nyimas Halimah) yang telah sangat berjasa dalam mendidik, mendo'akan, dan memberikan motivasi kepada penulis. Saudara-saudaraku terima kasih karena telah memberikan dorongan semangat, dan do'a yang tulus disetiap langkah dan perjuanganku.

Penulis juga mengucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada Bapak Muhammad Fahmi S.E., M.Si yang telah membimbing, mengarahkan dan memberikan saran - saran yang berguna dalam menyelesaikan skripsi ini. Selain itu disampaikan juga ucapan terima kasih kepada pihak - pihak yang telah memberikan izin dan membantu penulis dalam menyelesaikan studi di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Palembang, diantaranya:

1. Bapak Abid Djaluzi S.E., M.M selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Palembang.

2. Bapak Fauzi Ridwan, S.E., M.M. selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Palembang.
3. Bapak Betri Sirajudin S.E.,Ak.,M.Si.,CA selaku ketua Program Studi Akuntansi Universitas Muhammadiyah Palembang.
4. Bapak Muhammad Fahmi S.E.,M.Si selaku Pembimbing Skripsi yang telah mengarahkan serta memberi saran yang berguna dalam membantu menyelesaikan skripsi ini.
5. Bapak dan Ibu Dosen serta seluruh staf pengajar Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Palembang.
6. Pimpinan, staf dan karyawan pada Dinas Pariwisata dan Seni Budaya Kabupaten OKU TIMUR, terima kasih atas bantuan dan kerjasamanya, dalam proses penulisan skripsi ini.
7. Kepada keluargaku tersayang Arimbi Purnama Sari S.Kep, Efrida Kartika Sari S.Kep,Nuerse, Windu Indah Agustin A.md. Terima kasih telah member dorongan semangat dan do'a yang tulus di setiap perjuanganku.
8. Sahabat-sahabat seperjuangan Reny Ratna Rahim bantuan dan motivasinya.
9. Teman terbaikku Romodhon A.md atas semangat, dorongannya selama ini hingga skripsi ini selesai
10. Semua pihak yang telah ikut membantu dalam penyusunan skripsi ini yang tidak dapat disebutkan satu persatu oleh peneliti.

Dengan segala kerendahan hati, penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam menyelesaikan skripsi ini, semoga amal dan ibadah yang dilakukan mendapatkan balasan dari Allah S.W.T. Harapan penulis semoga skripsi ini bisa bermanfaat bagi para pembaca, Amin

Wassalamu' alaikum Warohmatullahi Wabarakatuh

Palembang, Maret 2017

Penulis

Padla Aulia Hadiyanti

DAFTAR ISI

HALAMAN DEPAN/COVER	i
HALAMAN JUDUL	ii
HALAMAN PERNYATAAN BEBAS PLAGIAT	iii
HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN DAN MOTTO	v
HALAMAN PRAKATA	vi
HALAMAN DAFTAR ISI	viii
HALAMAN DAFTAR TABEL	x
HALAMAN DAFTAR GAMBAR	xi
HALAMAN DAFTAR LAMPIRAN	xii
ABSTRAK	xiii
ABSTRACT	xiv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Tujuan Penelitian	7
D. Manfaat Penelitian	7

BAB II KAJIAN PUSTAKA.....	9
A. Penelitian Sebelumnya.....	9
B. Landasan Teori.....	11
1. Akuntabilitas.....	11
a. Pengertian Akuntabilitas.....	11
b. Dimensi Akuntabilitas.....	13
c. Alat-alat Akuntabilitas.....	14
2. Kinerja Instansi Pemerintah.....	16
a. Pengertian Kinerja.....	16
b. Tujuan Pengukuran Kinerja.....	18
c. Manfaat Pengukuran Kinerja.....	18
d. Siklus Pengukuran Kinerja.....	20
e. Prinsip-prinsip Pemilihan Ukuran Kinerja.....	22
f. Indikator-indikator Dalam Pengukuran Kinerja.....	23
g. Definisi Kinerja Instansi Pemerintah.....	25
3. Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	25
a. Pengertian Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	26
b. Tujuan laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	26
c. Prinsip-prinsip Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.....	26
d. Isi dan Manfaat Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.....	28
e. Permen PAN No 29 Tahun 2010 Tentang Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.....	28
f. Pengertian Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	29
g. Komponen SAKIP.....	30

BAB III METODE PENELITIAN	32
A. Jenis Penelitian.....	32
B. Lokasi Penelitian.....	32
C. Operasionalisasi Variabel	33
D. Data yang Diperlukan.....	33
E. Teknik Pengumpulan Data.....	34
F. Analisis Data dan Teknik Analisis.....	35
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	37
A. Hasil Penelitian	37
B. Pembahasan Hasil Penelitian	54
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	69
A. Kesimpulan	69
B. Saran	70
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

Tabel I.1	Data APBD	4
Tabel II.1	Penelitian Sebelumnya	11
Tabel III.1	Operasionalisasi Variabel	33
Tabel IV.1	Laporan Pengukuran Kinerja	50
Tabel IV.2	Laporan Akuntabilitas Keuangan.....	52

DAFTAR GAMBAR

GambarIV.1	StrukturOrganisasi	49
------------	--------------------------	----

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 : Wawancara

Lampiran 2 : *Fotocopy* Surat Izin Penelitian

Lampiran 2 : *Fotocopy* Surat Membacakan Menghafal Al-Qur'an
(Surat Pendek)

Lampiran 3 : *Fotocopy* Sertifikat TOEFL

Lampiran 4 : *Fotocopy* Sertifikat Kuliah Kerja Nyata (KKN)

Lampiran 5 : Biodata Peneliti

Lampiran 6 : Kartu Aktivitas Bimbingan

ABSTRAK

PadlaAuliaHadiyanti/222011170/AnalisisLaporanAkuntabilitasKinerjaPadaDinas
PariwisatadanSeniBudayaKabupaten OKU Timur.

Perumusan masalah dalam penelitian ini adalah Bagaimana Pelaksanaan Laporan Akuntabilitas Kinerja pada Dinas Pariwisata dan Seni Budaya Kabupaten OKU Timur? Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui Laporan Akuntabilitas Kinerja pada dinas Pariwisata dan Seni Budaya Kabupaten OKU Timur. Jenis penelitian yang digunakan adalah deskriptif. Data yang digunakan adalah data primer. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara dan dokumentasi. Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa laporan akuntabilitas kinerja Dinas Pariwisata dan Seni Budaya Kabupaten OKU Timur tahun 2015 telah disajikan belum sesuai dengan pedoman Peraturan Menteri Negara dan Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010.

Kata Kunci: Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Akuntabilitas
Kinerja

ABSTRACT

PadlaAuliaHadiyanti/222011170/Analysis of Accountability Report of Government Agency at DinasPariwisatadanSeniBudayaKabupaten OKU Timur.

The problem formulation role in this research is how the implementation of the Performance Accountability Report of the Department of Tourism and Cultural Art District East OKU ?. The purpose of this study to determine the Performance Accountability Report on the official Tourism and Cultural Art District East OKU . This type of research is descriptive . The data used are primary data . Data collection techniques used in this study were interviews and documentation . Methods of data analysis used in this study is a qualitative analysis .

The results showed that performance accountability reports the Department of Tourism and Cultural Art District East OKU 2015 presented not in accordance with the guidelines and regulations of the State Minister of Administrative Reform and Bureaucratic Reform No. 29 of 2010 .

Keywords :Performance and Accountability Report of Government Agencies (LAKIP), Accountability, Performance.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Akuntansi sektor publik adalah sistem akuntansi yang dipakai oleh lembaga-lembaga publik sebagai salah satu pertanggungjawaban kepada publik. Sekarang terdapat perhatian yang semakin besar terhadap praktek akuntansi yang dilakukan oleh lembaga-lembaga publik, baik akuntansi sektor pemerintahan maupun lembaga publik non-pemerintahan. Akuntansi sektor publik dapat diinterpretasikan sebagai bidang akuntansi yang secara khusus membahas penggunaan akuntansi dalam kegiatan-kegiatan sektor publik. Secara luas, sektor publik meliputi lembaga-lembaga tinggi negara dan departemen-departemen di bawahnya, pemerintah daerah, perusahaan negara, di Indonesia dikenal sebagai BUMN dan BUMD, partai politik, yayasan dan lembaga non profit lainnya (Kusni warsini, 2009).

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) dapat dikatakan merupakan bentuk perpanjangan tangan pemerintah dalam memperkuat akuntabilitas kinerja yang ada di dalam agenda perubahan reformasi birokrasi yang juga merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban kinerja atas keberhasilan maupun kegagalan terhadap penyelenggaraan pemerintahan kepada masyarakat. Hal ini diatur dalam Instruksi Presiden nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Menimbang bahwa dalam rangka lebih

meningkatkan pelaksanaan pemerintahan yang lebih berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab, dipandang perlu adanya pelaporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah untuk mengetahui kemampuannya dalam pencapaian visi, misi dan tujuan organisasi. Kemudian pemerintah melalui Kementrian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokasi (Kemenpan RB) juga telah menerbitkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokasi Nomor 29 tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Sebelum instansi pemerintah menyampaikan laporan dimana didalam laporan tersebut memuat tentang akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dalam kurun waktu 1 tahun, yang kemudian dikenal dengan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP), terlebih dahulu ada sebuah rangkaian tahapan yang digunakan untuk menyusun LAKIP. Sistem tersebut disebut Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dimana SAKIP merupakan instrumen yang digunakan instansi pemerintah dalam memenuhi kewajiban untuk mempertanggungjawabkan atas keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan dari misi organisasi yang terdiri dari berbagai komponen yang merupakan kesatuan dimulai dari proses perencanaan strategik, perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja dan evaluasi kinerja.

Dalam rangka pencapaian *good governance*, untuk itu dibutuhkan penerapan sistem akuntabilitas kinerja di Dinas Pariwisata dan Seni Budaya Kabupaten OKU Timur. Akuntabilitas kinerja merupakan perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi

dan visi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditentukan dan ditetapkan melalui seperangkat indikator kinerja atau alat pertanggungjawaban secara periodik. Mengingat pentingnya pencapaian tujuan suatu instansi tersebut setiap pimpinan dan pegawai perlu meningkatkan penerapan sistem akuntabilitas kinerja secara sistematis, terstruktur, dan terdokumentasi dengan baik untuk mendapatkan hasil yang maksimal.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) tersebut dipandang perlu untuk mengetahui kemampuan setiap instansi dalam pencapaian visi, misi dan tujuan organisasi. Susan Susanto (2013:162) akuntabilitas dapat dipahami sebagai kewajiban pihak pemegang amanah (*agent*) untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan, dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya kepada pihak pemberi amanah (*principal*) yang memiliki hak dan kewenangan untuk meminta pertanggungjawaban tersebut.

Untuk mengetahui sampai sejauh mana instansi pemerintah telah menerapkan sistem manajemen kinerja dan pengendalian mutunya dengan baik maka sebaiknya dilakukan pelaksanaan LAKIP. Ini diperlukan dengan mengasumsikan bahwa jika sistem AKIP berjalan dengan baik, maka akan dapat mewujudkan hasil yang baik. Instansi pemerintah sudah seharusnya selalu memperbaiki manajemen kinerjanya agar dapat meningkatkan kinerja dan akuntabilitasnya, walaupun belum diketahui sejauh mana keberhasilan instansi tersebut meraih output yang diharapkan. Karena peningkatan kinerja tidak bisa dipisahkan dari evaluasi atas sistem yang berjalan. Disisi lain, tidaklah cukup

hanya mengandalkan perbaikan sistem saja karena terdapat perbaikan beberapa sektor seperti perbaikan budaya organisasi, kepemimpinan dan lain-lain yang juga harus diperhatikan.

Dinas Pariwisata dan Seni Budaya Kabupaten OKU TIMUR merupakan salah satu instansi pemerintah daerah Kabupaten OKU TIMUR untuk memperkenalkan/mempromosikan Kabupaten OKU TIMUR kedalam dan luar provinsi bahkan mancanegara kejenjang yang lebih profesional dibidang pariwisata, seni budaya serta ingin menggali, mendata dan mengembangkan potensi aset wisata dan seni budaya yang mempunyai prospek yang lebih baik pada masa yang akan datang.

Fenomena yang terjadi di lingkungan pemerintah daerah, dimana kinerja pemerintah saat ini banyak disoroti oleh masyarakat, terutama kinerja instansi pemerintah yang sebagian besar kegiatannya dibiayai oleh dana publik. Untuk Pemerintah kabupaten OKU Timur, berdasarkan data APBD Tahun 2015, secara keseluruhan belum menunjukkan indikasi adanya peningkatan kinerja dan perbaikan kinerja yang signifikan dalam pelaksanaannya seperti yang diuraikan pada tabel dibawah ini:

Tabel I.1
Data APBD Dinas Pariwisata dan Seni Budaya
Kabupaten OKU Timur Tahun 2015

Uraian Jenis Belanja	Anggaran	Realisasi Belanja	Persentase (daya serap)
Belanja Tidak Langsung	1.167.875.483	1.013.390.400	86,7%
Belanja Pegawai	87.525.000	68.268.000	77,9%
Belanja Barang dan Jasa	1.130.483.000	1.115.050.000	98,6%
Belanja Modal	3.705.212.000	3.438.774.800	92,8%
Jumlah	6.091.095.483	5.635.493.200	92,5%

Sumber: LAKIP Dinas Pariwisata dan Seni Budaya, 2015

Dilihat dari tabel I.1, Pada Tahun Anggaran 2015, Dinas Pariwisata dan Seni Budaya Kabupaten OKU Timur mendapatkan anggaran APBD sebesar Rp. 6.091.095.483,- yang terdiri dari Belanja Tidak Langsung Rp. 1.167.875.483,- dan Belanja Langsung Rp. 4.923.220.000,-. Jumlah anggaran tersebut cukup besar, maka dibutuhkan pengelolaan yang efektif dan efisien sehingga program dan kegiatan yang direncanakan dapat terlaksana dengan baik karena ditunjang dengan alokasi dana yang memadai. Pengelolaan anggaran tersebut tentunya harus dapat dipertanggungjawabkan secara transparan dan akuntabel.

Berdasarkan survey pendahuluan pada Dinas Pariwisata dan Seni Budaya Kabupaten OKU Timur dilakukan wawancara dengan Uswatun Hasanah staff bagian administrasi mengatakan bahwa kurangnya tenaga/pegawai administrasi dalam kegiatan administrasi keuangan pada Dinas Pariwisata dan Seni Budaya Kabupaten OKU TIMUR sering terhambat serta Anggaran Dana Bantuan Pagelaran Seni dan Alat Kesenian tidak terserap maksimum karena kurangnya tenaga kerja/pegawai untuk mensurvey proposal-proposal yang masuk dari

Berdasarkan uraian di atas penulis mencoba meneliti laporan akuntabilitas kinerja dengan mengambil judul skripsi “**Analisis Laporan Akuntabilitas Kinerja Pada Dinas Pariwisata dan Seni Budaya Kabupaten OKU Timur**”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan dari uraian latar belakang diatas, maka dirumuskan permasalahan dalam penelitian ini yaitu “Bagaimana Pelaksanaan Laporan Akuntabilitas Kinerja pada Dinas Pariwisata dan Seni Budaya Kabupaten OKU Timur?”

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan dari rumusan masalah diatas, maka yang menjadi tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui Laporan Akuntabilitas Kinerja pada dinas Pariwisata dan Seni Budaya Kabupaten OKU Timur.

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian, maka penelitian ini diharapkan akan memberikan manfaat bagi semua pihak diantaranya:

1. Bagi penulis

- a. Dapat memberi kontribusi terhadap perkembangan literatur akuntabilitas yang selanjutnya dapat digunakan sebagai acuan dalam penelitian selanjutnya.
- b. Dapat dijadikan alternatif pemerintah dalam menilai laporan akuntabilitas kinerja pada dinas pariwisata dan seni budaya.

2. Bagi Kantor Dinas Pariwisata dan Seni Budaya

Dapat memberikan masukan yang berarti bagi Dinas Pariwisata dan Seni Budaya Kabupaten OKU TIMUR dalam menerapkan nilai-nilai dalam setiap tindakan pegawainya, khususnya dalam penerapan laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.

3. Bagi Almamater

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi tambahan, menambah ilmu pengetahuan.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Penelitian Sebelumnya

Penelitian sebelumnya dilakukan oleh Susan Susanto yang berjudul Analisis Laporan Kinerja pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Sulawesi Utara. Rumusan masalah dan tujuan dari penelitian ini yaitu mengetahui kesesuaian Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Sulawesi Utara khususnya Sekretariat terhadap fungsinya sebagai penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban serta mengetahui kendala apa saja yang ada dalam penyajian LAKIP yang mengacu pada Permen PAN No.29 tahun 2010. Teknik analisis data yang digunakan adalah data metode kualitatif. Data yang digunakan adalah data primer.

Hasil penelitian adalah penelitian menunjukkan bahwa Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Sulawesi Utara telah disajikan dengan cukup baik dan sesuai dengan Permen PAN No. 29 tahun 2010.

Penelitian lain yang dilakukan oleh Kusni Warsini (2009) yang berjudul Analisis Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2007 (Studi Kasus pada Dinas Kesehatan Kabupaten Sukoharjo). bertujuan untuk mengetahui kesesuaian penyusunan laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.

Hasil penelitian adalah setelah melakukan analisis pada laporan akuntabilitas kinerja instansi Pemerintah Dinas Kesehatan Kabupaten Sukoharjo

susunan LAKIP pada Dinas Kesehatan Kabupaten Sukoharjo belum sempurna dikarenakan ada beberapa ukuran pada indikator kinerja kegiatan tidak jelas, sehingga penulis menemukan kesulitan dalam menghitung tingkat ekonomis, efisiensi dan efektivitas.

Penelitian selanjutnya yang dilakukan oleh Erly Putri Mandasari (2015) yang berjudul Laporan Akuntabilitas Kinerja Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Pasuruan: Perspektif Value For Money. Rumusan masalah dari penelitian ini yaitu 1) Bagaimana badan lingkungan hidup kabupaten pasuruan menyajikan laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (LAKIP)? 2) bagaimana penggunaan value for money tereflesi dengan laporan kinerja badan lingkungan hidup kabupaten pasuruan?. Menggunakan metode deskriptif analisis dan verifikatif dengan pendekatan kualitatif. Dengan menggunakan metode penelitian akan diketahui hubungan yang signifikan antara variabel yang diteliti sehingga menghasilkan kesimpulan yang akan memperjelas gambaran mengenai objek yang diteliti.

Hasil penelitian ini menunjukkan laporan akuntabilitas kinerja badan lingkungan hidup kabupaten pasuruan tahun 2014 telah disajikan sesuai dengan pedoman peraturan menteri negara pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi nomor 29 tahun 2010.

Tabel II.1
Penelitian Sebelumnya

NO	Nama, Tahun, Judul Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1.	Susan Susanto yang berjudul Analisis Laporan Kinerja pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Sulawesi Utara	Persamaan dengan penelitian sekarang yaitu sama-sama meneliti tentang akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.	Perbedaannya dengan penelitian sekarang yaitu pada objek penelitian
2.	Kusni Warsini (2009) Analisis Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2007 (Studi Kasus pada Dinas Kesehatan Kabupaten Sukoharjo	Persamaan dengan penelitian sekarang yaitu sama-sama meneliti tentang akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.	Perbedaannya dengan penelitian sekarang yaitu pada objek penelitian
3.	Erly Putri Mandasari (2015) yang berjudul Laporan Akuntabilitas Kinerja Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Pasuruan: Perspektif Value For Money	Persamaan dengan penelitian sekarang yaitu sama-sama meneliti tentang akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.	Perbedaannya dengan penelitian sekarang yaitu pada objek penelitian

Sumber: Penulis 2016

B. Landasan Teori

1. Akuntabilitas

a. Pengertian Akuntabilitas

Susan Susanto (2013:162) akuntabilitas dapat dipahami sebagai kewajiban pihak pemegang amanah (*agent*) untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan, dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya kepada pihak pemberi amanah (*principal*) yang memiliki hak dan kewenangan untuk meminta pertanggungjawaban tersebut.

Akuntabilitas merupakan konsep yang kompleks yang lebih sulit mewujudkannya dari pada memberantas korupsi. Akuntabilitas terkait erat dengan instrumen untuk kegiatan kontrol terutama dalam hal pencapaian hasil pada pelayanan publik dan menyampaikannya secara transparan kepada masyarakat. Mardiasmo (2009:20) Konsep tentang akuntabilitas secara harfiah dalam bahasa Inggris biasa disebut dengan *accountability* yang diartikan sebagai “yang dapat dipertanggungjawabkan” atau dalam kata sifat disebut sebagai *accountable*.

Pengertian akuntabilitas Mardiasmo (2009:23) adalah kewajiban agen (pemerintah) untuk mengelola sumber daya, melaporkan dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang berkaitan dengan penggunaan sumber daya publik kepada pemberi mandat (*prinsipal*).

Dari berbagai definisi dan penjelasan mengenai akuntabilitas yang telah disebutkan di atas, dapat disimpulkan bahwa akuntabilitas merupakan perwujudan kewajiban seseorang atau unit organisasi untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepadanya dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan melalui media pertanggungjawaban berupa laporan akuntabilitas kinerja secara periodik.

b. Dimensi Akuntabilitas

Akuntabilitas publik menjadi landasan utama proses penyelenggaraan pemerintahan yang baik. Karena itu aparat pemerintah harus mempertanggungjawabkan seluruh aktivitas dan pelaksanaan kerjanya kepada publik. Dalam konteks organisasi pemerintahan sendiri, akuntabilitas publik merupakan pemberian informasi atas aktivitas dan kinerja pemerintah kepada pihak-pihak yang berkepentingan. Penekanan utama akuntabilitas publik adalah pemberian informasi kepada publik dan konstituen lainnya yang menjadi pemangku kepentingan (*stakeholder*).

Akuntabilitas publik yang harus dilakukan oleh organisasi sektor publik terdiri atas beberapa dimensi. terdapat lima dimensi akuntabilitas yang harus dipenuhi oleh organisasi sektor publik (Anonim, 2007:11), yaitu

- 1) Akuntabilitas hukum dan kejujuran (*accuntability for probity and legality*).

Akuntabilitas hukum terkait dengan dilakukannya kepatuhan terhadap hukum dan peraturan lain yang disyaratkan dalam organisasi, sedangkan akuntabilitas kejujuran terkait dengan penghindaran penyalahgunaan jabatan, korupsi dan kolusi.

- 2) Akuntabilitas manajerial

Akuntabilitas manajerial dapat juga diartikan sebagai akuntabilitas kinerja (*performance accountability*) adalah pertanggungjawaban untuk melakukan pengelolaan organisasi secara efektif dan efisien.

3) Akuntabilitas program

Akuntabilitas program juga berarti bahwa program-program organisasi hendaknya merupakan program yang bermutu dan mendukung strategi dalam pencapaian visi, misi dan tujuan organisasi.

4) Akuntabilitas kebijakan

Lembaga - lembaga publik hendaknya dapat mempertanggungjawabkan kebijakan yang telah ditetapkan dengan mempertimbangkan dampak dimasa depan.

5) Akuntabilitas finansial

Akuntabilitas merupakan pertanggungjawaban lembaga publik untuk menggunakan dana publik (*public money*) secara ekonomis, efisien dan efektif, tidak ada pemborosan dan kebocoran dana, serta korupsi.

c. Alat-alat Akuntabilitas

Karena akuntabilitas memerlukan pelaporan, fokus dari alat-alat akuntabilitas adalah pada pelaporan kinerja, baik perhatian maupun hasilnya. Alat-alat Akuntabilitas mencakup :

1) Rencana Stratejik.

Rencana stratejik adalah suatu proses yang membantu organisasi untuk memikirkan tentang sasaran yang harus diterapkan untuk memenuhi misi mereka dan arah apa yang harus dikerjakan untuk mencapai sasaran tersebut. Hal tersebut adalah dasar dari semua

perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi kegiatan suatu organisasi.

2) Rencana Kinerja.

Rencana kinerja menekankan komitmen organisasi untuk mencapai hasil tertentu sesuai dengan tujuan, sasaran, dan strategi dari rencana strategis organisasi untuk permintaan sumber daya yang dianggarkan.

3) Kesepakatan Kinerja.

Kesepakatan kinerja didesain, dalam hubungannya antara dengan yang melaksanakan pekerjaan untuk menyediakan sebuah proses untuk mengukur kinerja dan bersamaan dengan itu membangun akuntabilitas.

4) Laporan Akuntabilitas.

Dipublikasikan tahunan laporan akuntabilitas termasuk program dan informasi keuangan, seperti laporan keuangan yang telah diaudit dan indikator kinerja yang merefleksikan kinerja dalam hubungannya dengan pencapaian tujuan utama organisasi.

5) Penilaian Sendiri.

Adalah proses berjalan dimana organisasi memonitor kinerjanya dan mengevaluasi kemampuannya mencapai tujuan kinerja, ukuran capaian kinerjanya dan tahapan-tahapan, serta mengendalikan dan meningkatkan proses itu.

6) Penilaian Kinerja.

Adalah proses berjalan untuk merencanakan dan memonitor kinerja. Penilaian ini membandingkan kinerja aktual selama periode review tertentu dengan kinerja yang direncanakan. Dari hasil perbandingan tersebut, terdapat hal-hal yang perlu diperhatikan, perubahan atas kinerja yang diterapkan dan arah masa depan bisa direncanakan.

7) Kendali Manajemen

Akuntabilitas manajemen adalah harapan bahwa para manajer akan bertanggungjawab atas kualitas dan ketepatan waktu kinerja, meningkatkan produktivitas, mengendalikan biaya dan menekan berbagai aspek negatif kegiatan, dan menjamin bahwa program diatur dengan integritas dan sesuai peraturan yang berlaku.

2. Kinerja Instansi Pemerintah

a. Pengertian Kinerja

Susan Susanto (2013:164) Kinerja adalah hasil kerja secara kualitas dan kuantitas yang dapat dicapai oleh seorang pegawai dalam melaksanakan tugas sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan kepadanya.

Indra Bastian (2006:274) Kinerja adalah gambaran pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan/program/kebijaksanaan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi, dan visi organisasi. Daftar apa yang ingin dicapai

tertuang dalam perumusan perencanaan strategi (*strategic planning*) suatu organisasi. secara umum, kinerja merupakan prestasi yang dicapai oleh organisasi dalam periode tertentu.

Marwansyah (2010:228) berpendapat bahwa kinerja adalah pencapaian/ prestasi seseorang berkenaan dengan tugas-tugas yang dibebankan kepadanya. Kinerja dapat pula dipandang sebagai perpaduan dari hasil kerja (apa yang harus dicapai oleh seseorang) dan kompetensi (bagaimana seseorang mencapainya).

Indra Bastian (2006:329) Pengukuran kinerja merupakan proses mencatat dan mengukur pencapaian pelaksanaan kegiatan dalam arah pencapaian misi (*mission accomplishment*) melalui hasil-hasil yang ditampilkan berupa produk, jasa ataupun suatu proses.

Di Indonesia, praktik pengukuran kinerja instansi pemerintah telah dilakukan setelah dikeluarkan Inpres No. 7 tahun 1999 tentang akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Menanggapi instruksi tersebut, Lembaga Administrasi Negara dan BPKP menyusun buku pedoman penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP).

Dari beberapa pengertian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa kinerja adalah hasil karya dari sumber daya manusia (pegawai) yang berada dalam suatu organisasi atau institusi dengan berpedoman pada tujuan yang telah digariskan demi tercapainya tujuan dari organisasi tersebut.

b. Tujuan pengukuran kinerja

Mardiasmo (2009:122) Prestasi pelaksanaan program yang dapat diukur akan mendorong pencapaian prestasi tersebut. Pengukuran prestasi yang dilakukan secara berkelanjutan memberikan umpan baik untuk perbaikan secara terus-menerus dan pencapaian tujuan dimasa mendatang, secara umum tujuan sistem pengukuran kinerja adalah:

- 1) Untuk mengkomunikasikan strategi secara lebih baik (*top down and bottom up*)
- 2) Untuk mengukur kinerja finansial dan nonfinansial secara berimbang sehingga dapat ditelusuri perkembangan pencapaian strategi
- 3) Untuk mengakomodasikan pemahaman kepentingan manager level menengah bawah serta memotivasi untuk mencapai *goal congruence*
- 4) Sebagai alat untuk mencapai kepuasan berdasarkan pendekatan individual dan kemampuan kolektif yang rasional

Berdasarkan tujuan-tujuan tersebut dapat disimpulkan bahwa tujuan pengukuran kinerja adalah untuk memberikan informasi yang lengkap tentang pencapaian kinerja dan bukan sekedar menyajikan laporan keuangan saja. Perencanaan maupun pelaksanaan berbagai program organisasi harus senantiasa berorientasi pada pencapaian misi organisasi.

c. Manfaat pengukuran kinerja

Prestasi pelaksanaan program yang dapat diukur, dapat didorong pencapaian prestasi tersebut, pengukuran prestasi dapat dilakukan secara

berkelanjutan memberikan umpan balik untuk menentukan perbaikan secara terus menerus.

Mardiasmo (2009:122), manfaat pengukuran kinerja adalah:

- 1) Memberikan pemahaman mengenai ukuran yang digunakan untuk menilai kinerja manajemen,
- 2) Memberikan arah untuk mencapai target kinerja yang telah ditetapkan,
- 3) Untuk memonitor dan mengevaluasi pencapaian kinerja dan membandingkannya dengan target kinerja serta melakukan tindakan korektif untuk memperbaiki kinerja,
- 4) Sebagai dasar untuk memberikan penghargaan dan hukuman (*reward and punishment*) serta objektif atas pencapaian prestasi yang diukur sesuai dengan pengukuran kinerja yang telah disepakati,
- 5) Sebagai alat komunikasi antara bawahan dan pimpinan dalam rangka memperbaiki kinerja organisasi,
- 6) Membantu mengidentifikasi apakah keuasan pelanggan sudah terpenuhi,
- 7) Membantu memahami proses kegiatan instansi pemerintah,
- 8) Memastikan bahwa pengambilan keputusan diambil secara objektif,

Indra Bastian (2006:330), pengukuran kinerja sangat penting perannya sebagai alat manajemen untuk:

- 1) Memastikan pemahaman para pelaksana akan ukuran yang digunakan untuk pencapaian kinerja,
- 2) Memastikan tercapainya kinerja yang telah disepakati,

- 3) Memonitor dan mengevaluasi pelaksanaan kinerja dan membandingkan dengan rencana kinerja serta melakukan tindakan untuk memperbaiki kinerja,
- 4) Memberikan penghargaan dan hukuman yang objektif atas prestasi pelaksanaan yang telah diukur sesuai dengan sistem pengukuran kinerja yang telah disepakati,
- 5) Menjadi alat komunikasi antar bawahan dan pimpinan dalam rangka upaya memperbaiki kinerja organisasi,
- 6) Mengidentifikasi apakah kepuasan pelanggan (masyarakat) sudah terpenuhi,
- 7) Membantu memahami proses kegiatan instansi pemerintah,
- 8) Memastikan bahwa pengambilan keputusan dilakukan secara objektif,
- 9) Menunjukkan peningkatan yang perlu dilakukan,
- 10) Mengungkapkan permasalahan yang terjadi,

Berdasarkan manfaat-manfaat tersebut dapat disimpulkan bahwa manfaat pengukuran kinerja adalah sebagai landasan untuk memperbaiki umpan balik, mengidentifikasi butir-butir kekuatan untuk mengembangkan kinerja dimasa mendatang, serta mengidentifikasi butir-butir kelemahan sebagai sarana koreksi dan pengembangan.

d. Siklus Pengukuran Kinerja

Indra Bastian (2006:133), terdapat 5 tahap untuk melakukan Pengukuran kinerja yaitu perencanaan strategi, penciptaan indikator

kinerja, mengembangkan sistem pengukuran data, penyempurnaan ukuran kinerja dan mengintegrasikan dengan proses manajemen. Berikut uraian masing-masing tahap sebagai berikut:

1) Perencanaan strategi

Siklus pengukuran kinerja dimulai dengan proses perencanaan strategi, yang berkenaan dengan penetapan visi, misi, tujuan dan sasaran, kebijakan, program operasional dan kegiatan/aktivitas.

2) Penciptaan indikator kinerja

Setelah perumusan strategi, instansi pemerintah perlu menyusun dan menetapkan ukuran/kinerja dan beberapa jenis program, tahapan ini mungkin mudah dan sederhana untuk didefinisikan indikator kinerja dapat berupa indikator *input, proses, output, outcomes, benefit, dan impact*. Indikator ukuran yang mudah adalah untuk aktivitas yang dapat dihitung.

3) Mengembangkan sistem pengukuran kinerja

Tahap ini terdiri dari tiga langkah, yaitu: Pertama, meyakinkan keberadaan data yang diperlukan dalam siklus pengukuran kinerja. Kedua, mengukur kinerja dengan data yang tersedia dan data yang dikumpulkan. Ketiga, penggunaan data pengukuran yang dihimpun, harus dipresentasikan dalam cara-cara yang dapat dimengerti dan bermanfaat.

4) Penyempurnaan ukuran

Pada tahap ini dilakukan pemikiran kembali atas indikator hasil (*outcomes*) dan indikator dampak (*impacts*) menjadi lebih penting dibandingkan dengan pemikiran kembali atas indikator masukan (*inputs*) dan keluaran (*outputs*).

5) Pengintegrasian dengan proses manajemen

Pada saat ukuran kinerja tersedia, tantangan selanjutnya adalah mengintegrasikan pengukuran kinerja dengan proses manajemen.

e. Prinsip-prinsip pemilihan ukuran kinerja

Indra Bastian (2006:330), pemilihan ukuran kinerja untuk instansi mempertimbangkan prinsip-prinsip sebagai berikut:

- 1) Evaluasi kembali ukuran yang ada dan dievaluasi secara rutin. Apabila sudah tidak berguna, maka alasan yang terkait dengan kenyamanan manajemen perlu dikemukakan.
- 2) Mengukur kegiatan yang penting, tidak hanya hasil keseluruhan.
- 3) Pengukuran harus memotivasi kinerja untuk mencapai tujuan (*goal teamwork*).
- 4) Pembagian proses pengukuran disesuaikan dengan mekanisme tim kerja. Apabila tim berkerja dalam kerangka pencapaian tujuan, maka pengukuran lebih pada proses pencapaian tujuan.
- 5) Proses merupakan perangkat yang terintegrasi dengan strategi organisasi.
- 6) Sistem pengukuran harus terintegrasi dengan strategi organisasi.

- 7) Sistem pengukuran akan memonitor, meminimalisi biaya, peningkatan kualitas, pengukuran waktu pelaksanaan produksi, dan penciptaan pengembalian investasi yang wajar.
- 8) Proses pengukuran harus melibatkan akuntabilitas publik.

Berdasarkan prinsip-prinsip pemilihan ukuran kinerja dapat disimpulkan bahwa prinsip-prinsip pemilihan ukuran kinerja adalah harus konsisten dengan tujuan organisasi, mengukur kegiatan yang terpenting saja dimana hasilnya dipergunakan untuk memotivasi tim kerja agar bertujuan organisasi, dan proses pengukuran kinerjanya harus melibatkan akuntabilitas publik.

f. Indikator-indikator dalam pengukuran kinerja

Indra Bastian (2006) mendefinisikan indikator kinerja sebagai berikut “Indikator kinerja adalah ukuran kualitatif dan kuantitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian sasaran atau tujuan yang telah ditetapkan, dengan memperhitungkan elemen indikator kinerja”

Elemen indikator kinerja menurut Indra Bastian (2006) sebagai berikut:

- 1) ***Inputs*** (masukan)
- 2) ***Outputs*** (keluaran)
- 3) ***Outcomes*** (hasil)
- 4) ***Benefits*** (manfaat)
- 5) ***Impacts*** (dampak)

Berdasarkan kutipan diatas dapat dijelaskan sebagai berikut:

1) Indikator *inputs*

Menunjukkan sumber daya yang digunakan dalam suatu proses, program, maupun aktivitas untuk menghasilkan keluaran (*output* maupun *outcome*).

2) Indikator *outputs*

Menunjukkan jumlah produk atau jasa yang dihasilkan langsung dari suatu proses, program atau aktivitas yang dapat berupa fisik dan atau non fisik.

3) Indikator *outcomes*

Menunjukkan tingkat suatu aktivitas, proses, maupun program dalam memenuhi tujuan yang telah ditentukan. Ukuran ini menggambarkan hasil-hasil aktual yang dicapai dan berbagai efek yang dihasilkan.

4) Indikator *benefits*

Sesuatu yang terkait dengan tujuan akhir dari pelaksanaan kegiatan Indikator kinerja ini menggambarkan manfaat yang diperoleh dari indikator hasil. Manfaat tersebut baru kelihatan/diketahui setelah beberapa waktu kemudian khususnya dalam jangka menengah dan jangka panjang.

5) Indikator *Impacts*

Memperlihatkan pengaruh yang ditimbulkan dari manfaat baik positif maupun negatif yang diperoleh dari hasil kegiatan. Seperti halnya dengan indikator manfaat, indikator dampak juga pada umumnya baru dapat diketahui dalam jangka waktu menengah atau jangka panjang.

Indikator impacts ini menunjukkan dasar pemikiran dilaksanakannya kegiatan yang menggambarkan aspek makro pelaksanaan kegiatan.

g. Kinerja Instansi Pemerintah

Definisi kinerja instansi pemerintah sendiri menurut Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara No : 239/IX/6/8/2003 adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian sasaran ataupun tujuan instansi pemerintah sebagai penjabaran dari visi, misi dan strategi instansi pemerintah yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan-kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang ditetapkan.

3. Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)

Berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 7 tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, ada kewajiban setiap instansi pemerintah untuk menyusun dan melaporkan penskemaan strategik tentang program-program utama yang akan dicapai selama satu sampai dengan lima tahun, sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing instansi dan jajarannya. Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) tersebut dimaksudkan untuk *eforcement* agar masing-masing instansi mempunyai visi, misi, dan strategi untuk mencapai program-program yang sesuai dengan tugas pokok dan fungsi instansi.

1) Prinsip lingkup pertanggungjawaban.

Adanya *responsibility center* sehingga lingkungannya jelas. Hal-hal yang dikendalikan (*controllable*) oleh pihak yang melaporkan harus dapat dimengerti pembaca laporan.

2) Prinsip prioritas.

Yang dilaporkan adalah hal-hal yang renting dan relevan bagi pengambilan keputusan dan pertanggungjawaban instansi yang diperlukan untuk upaya-upaya tindak lanjutnya.

3) Prinsip manfaat

Manfaat laporan harus lebih besardaripada biaya penyusunannya dan laporan harus mempunyai manfaat bagi peningkatan pencapaian kinerja. dalam hubungan itu, perlu pula diperhatikan beberapa ciri laporan yang baik seperti relevan, tepat waktu, dapat dipercaya, diandalkan, mudah dimengerti jelas dan cermat, dalam bentuk yang menarik (tegas dan konsisten, tidak kontradiktif antar bagian), berdaya banding tinggi (*reliable*), berdaya uji (*verifiable*), lengkap, netral, padat, dan mengikuti standar laporan yang ditetapkan.

Berdasarkan prinsip-prinsip Lakip tersebut dapat disimpulkan bahwa prinsip Lakip yaitu harus membuat hal-hal penting dan relevan serta transparan mengenai keberhasilan dan kegagalan organisasi pemerintah sehingga LAKIP dapat bermanfaat bagi peningkatan pencapaian kinerja.

d. Isi dan Manfaat dari Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

Isi Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah merupakan uraian pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi dalam rangka pencapaian visi dan misi serta penjabarannya yang menjadi perhatian utama instansi pemerintah, isi LAKIP sebagai berikut:

- 1) Perumusan visi, misi, faktor-faktor kunci keberhasilan, tujuan sasaran dan strategi instansi pemerintah
- 2) Perumusan indikator kinerja yang terdiri dari masukan (*inputs*), proses (*process*), keluaran (*outputs*), manfaat (*benefits*), dan dampak (*impacts*)
- 3) Ada tidaknya komitmen dari pimpinan dan seluruh staf instansi pemerintahan yang bersangkutan
- 4) Ada sistem yang mampu menjamin penggunaan sumber daya secara konsisten dengan peraturan perundang-undangan
- 5) Menunjukkan tingkat pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan
- 6) Jujur, objektif, transparan dan inovatif.

e. Permen PAN Nomor : 29 Tahun 2010 tentang Laporan Akuntabilitas Kinerja

Laporan akuntabilitas kinerja (Pasal 12) adalah laporan kinerja tahunan yang berisi pertanggungjawaban kinerja suatu instansi dalam mencapai tujuan/sasaran strategis instansi. Laporan akuntabilitas kinerja sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 berisi ikhtisar pencapaian sasaran

sebagaimana ditetapkan dalam dokumen penetapan kinerja dan dokumen perencanaan (Pasal 16 ayat 1). Pencapaian sasaran sebagaimana dimaksud sekurang-kurangnya menyajikan informasi (Pasal 16 ayat 2) tentang :

- 1) Pencapaian tujuan dan sasaran organisasi
- 2) Realisasi pencapaian indikator kinerja utama organisasi
- 3) Penjelasan yang memadai atas pencapaian kinerja
- 4) Perbandingan capaian kinerja sampai tahun berjalan dengan target kinerja 5 tahun yang direncanakan.

Manfaat laporan akuntabilitas kinerja yang diatur pada pasal 18 adalah sebagai berikut :

- 1) Bahan evaluasi akuntabilitas kinerja bagi pihak yang membutuhkan
- 2) Penyempurnaan dokumen perencanaan periode yang akan datang
- 3) Penyempurnaan pelaksanaan program dan kegiatan yang akan datang
- 4) Penyempurnaan berbagai kebijakan yang diperlukan.

f. Pengertian Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah atau disingkat dengan SAKIP tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang mana didalamnya menyebutkan SAKIP merupakan rangkaian sistematis dari berbagai aktivitas, alat dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklarifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah, dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah.

Dalam Instruksi Presiden No. 7 Tahun 1999 dikatakan bahwa tujuan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah untuk mendorong terciptanya akuntabilitas kinerja instansi pemerintah sebagai salah satu prasyarat untuk terciptanya pemerintah yang baik dan terpercaya. Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dilaksanakan atas semua kegiatan utama instansi pemerintah yang memberikan kontribusi bagi pencapaian visi dan misi instansi pemerintah.

g. Komponen Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

Komponen SAKIP dilaksanakan untuk menghasilkan sebuah laporan kinerja yang berkualitas serta selaras dan sesuai dengan tahapan-tahapan meliputi :

1. Rencana Strategis

Rencana strategis merupakan dokumen perencanaan instansi pemerintah dalam periode 5 (lima) tahunan. Rencana strategis ini menjadi dokumen perencanaan untuk arah pelaksanaan program dan kegiatan dan menjadi landasan dalam penyelenggaraan SAKIP.

2. Perencanaan Kinerja

Perencanaan kinerja merupakan proses penyusunan rencana kinerja sebagai penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam rencana strategis, yang akan dilaksanakan oleh instansi pemerintah melalui berbagai kegiatan tahunan. Di dalam rencana kinerja ditetapkan

rencana capaian kinerja tahunan untuk seluruh indikator kinerja yang ada pada tingkat sasaran dan kegiatan (LAN, 2003:12).

3. Pengukuran Kinerja

Pengukuran kinerja digunakan sebagai dasar untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi instansi pemerintah (LAN,2003:18).

4. Evaluasi kinerja

Evaluasi kinerja bertujuan untuk mengetahui pencapaian realisasi, kemajuan dan kendala yang dijumpai dalam rangka pencapaian misi, agar dapat dinilai dan dipelajari guna perbaikan pelaksanaan program/kegiatan di masa yang akan datang.

5. Pelaporan Kinerja

Setiap instansi pemerintah berkewajiban untuk menyiapkan, menyusun dan menyampaikan laporan kinerja secara tertulis, periodik dan melembaga. Pelaporan kinerja ini dimaksudkan untuk mengkomunikasikan capaian kinerja instansi pemerintah dalam suatu tahun anggaran yang dikaitkan dengan proses pencapaian tujuan dan sasaran instansi pemerintah.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Sugiyono (2009: 53-55) jenis penelitian dilihat dari tingkat eksplansi:

1. Penelitian Deskriptif

Penelitian deskriptif adalah penelitian terhadap keberadaan variabel mandiri, baik hanya pada satu variabel atau lebih.

2. Penelitian Komparatif

Penelitian komparatif adalah suatu penelitian bersifat membandingkan atau berupa hubungan sebab-akibat antar dua variabel atau lebih.

3. Penelitian Asosiatif

Penelitian asosiatif adalah penelitian yang bertujuan untuk mengetahui hubungan dua variabel atau lebih.

Jenis penelitian yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian Deskriptif karena evaluasi yang diharapkan dapat memberikan masukan atau mendukung keputusan tentang Analisis Laporan Akuntabilitas Kinerja Dinas Pariwisata dan Seni Budaya Kabupaten OKU Timur .

B. Lokasi penelitian

Lokasi penelitian merupakan suatu tempat atau wilayah dimana penelitian tersebut akan dilakukan. Adapun penelitian yang dilakukan oleh penulis mengambil lokasi di Dinas Badan Pariwisata dan Seni Budaya Komplek

Perkantoran Pemkab OKU TIMUR Jl.Lintas Sumatera Km.08 Kotabaru Selatan Martapura, dengan luas wilayah 3.370 km² meliputi 20 Kecamatan, 7 Kelurahan, 286 Desa (hingga akhir 2014).

C. Operasionalisasi Variabel

Operasional variabel adalah suatu definisi yang diberikan kepada suatu variabel dengan cara memberikan arti atau menspesifikasikan bagaimana variabel atau kejadian yang diukur. Variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut

Tabel III. 1
Operasionalisasi Variabel

Variabel	Definisi	Indikator
Pelaksanaan LAKIP	Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah uraian pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi dalam rangka pencapaian visi dan pelaksanaan misi serta penjabarannya yang menjadi perhatian utama instansi pemerintah.	SAKIP 1) Rencana Strategis 2) Program Kerja 3) Pengukuran Kinerja 4) Evaluasi Kinerja dan Pelaporan Kinerja

Sumber: Penulis 2016

D. Data Yang Diperlukan

Sugiyono (2009:146-147) data yang digunakan dalam penelitian dapat berupa:

1) Data primer

Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari sumber aslinya (tidak melalui perantara).

2) Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang diperoleh penelitian secara tidak langsung (diperoleh dan dicatat dari orang lain).

Data yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah data primer berupa:

- a) Struktur organisasi Dinas Pariwisata dan Seni Budaya Kabupaten OKU Timur.
- b) Visi, misi organisasi
- c) Data Kinerja Tahunan Dinas Pariwisata dan Seni Budaya Kabupaten OKU Timur.
- d) Data Akuntabilitas Keuangan

E. Teknik Pengumpulan Data

Sugiyono (2009:402-425) mengemukakan teknik dalam pengumpulan data yang akan dilakukan dalam penelitian ini yaitu

1) Pengamatan Observasi

Merupakan pengamatan dan pencatatan yang sistematis terhadap gejala-gejala yang diteliti

a. Interview (wawancara)

Interview merupakan teknik pengumpulan data pada metode survei yang menggunakan pertanyaan secara lisan kepada subyek penelitian.

b. Kuesioner (angket)

Kuesioner (angket) merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberri seperangkat pertanyaan atau pernyataan tertulis kepada responden untuk dijawabnya.

c. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan catatan peristiwa yang sudah berlaku. Dokumentasi biasanya berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang.

Teknik pengumpulan data yang akan digunakan dalam Penelitian ini, penulis akan menggunakan metode wawancara dan dokumentasi.yaitu dengan melakukan percakapan langsung serta tanya jawab dengan pihak Dinas Pariwisata dan Seni Budaya Kabupaten OKU Timur yang dianggap membantu memberikan informasi yang dibutuhkan dalam penelitian ini, serta mengumpulkan data dan dokumen dengan cara difotocopy.

F. Analisis Data dan Teknik Analisis

Sugiyono (2009:13-14) analisis data dalam penelitian dapat dikelompokkan menjadi dua yaitu:

1) Analisis Kualitatif

Analisis kualitatif yaitu suatu metode analisis dengan menggunakan data yang berbentuk kata, kalimat, skema, dan gambar.

2) Analisis kuantitatif

Analisis Kuantitatif yaitu suatu metode analisis dengan menggunakan data berbentuk angka atau data kualitatif yang diangkakan.

Analisis data yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif yaitu dengan menjelaskan teori yang ada dalam buku-buku referensi untuk mengetahui laporan akuntabilitas kinerja pada Dinas Pariwisata dan Seni Budaya Kabupaten OKU Timur.

Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

- 1) Mengumpulkan data dan informasi mengenai Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) pada Dinas Pariwisata dan seni Budaya Kabupaten OKU Timur.
- 2) Menganalisis Laporan Akuntablitas Kinerja dan Akuntabilitas Keuangan Dinas Pariwisata dan Seni Budaya Kabupaten OKU Timur.
- 3) Menganalisis LAKIP berdasarkan Permen PAN Nomor 29 Tahun 2010

BAB IV
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

1. Gambaran Umum Dinas Pariwisata dan Seni Budaya Kabupaten OKU

Timur

a. Sejarah Singkat Dinas Pariwisata dan Seni Budaya Kabupaten OKU

Timur

Dinas Pariwisata dan Seni Budaya yang mulanya masih berbentuk Kantor sejak tanggal 25 Agustus 2006 s.d 15 Agustus 2007, dan seiring berjalannya maka pada tanggal, 16 Agustus 2007 dimekarkan menjadi Dinas Pariwisata dan Seni Budaya merupakan salah satu instansi Pemerintah Daerah Kabupaten OKU TIMUR untuk memperkenalkan/mempromosikan Kabupaten OKU TIMUR kedalam dan luar provinsi bahkan manca negara kejenjang yang lebih profesional di bidang pariwisata, seni dan budaya serta ingin menggali, mendata dan mengembangkan potensi aset wisata dan seni budaya yang mempunyai prospek yang lebih baik pada masa yang akan datang dan mengangkat potensi pariwisata dan seni budaya yang ada di OKU TIMUR.

Dasar Hukum pembentukan Dinas Pariwisata dan Seni Budaya Kabupaten OKU Timur adalah:

- 1) Undang-Undang RI Nomor 37 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan dan Kabupaten Ogan Ilir di Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indor³⁵ un 2003 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4347) ;
- 2) Undang-Undang RI Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) ;
- 3) Undang-Undang RI Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438)
- 4) Peraturan Pemerintah Ri Nomor 25 Tahun 2000 Tentang Kewenangan Pemerintah Dan Kewenangan Provinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
- 5) Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Nomor 12 Tahun 2007 tentang Perubahan Peraturan Daerah nomor 3 tahun 2006 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-dinas Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur

Dinas Pariwisata dan Seni Budaya Kabupaten OKU Timur berlokasi di Komplek Perkantoran Pemkab OKU TIMUR Jl. Lintas Sumatera Km. 08 Kotabaru Selatan Martapura.

b. Struktur Organisasi dan Uraian Tugas Dinas Pariwisata dan Seni Budaya Kabupaten OKU Timur

Berdasarkan peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2007 tentang Perubahan peraturan daerah nomor 3 Tahun 2006 tentang pembentukan Organisasi dan Tata kerja Dinas Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, telah ditetapkan Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pariwisata dan Seni Budaya Kabupaten OKU Timur:

1) Kepala Dinas

Kepala Dinas Pariwisata dan Seni Budaya mempunyai tugas melaksanakan kewenangan Bupati dalam menyelenggarakan Pemerintah di Bidang Pariwisata Seni dan Budaya dalam taraf perencanaan dan perumusan maupun taraf pelaksanaan dan kebijaksanaan, Memberi laporan mengenai situasi pariwisata, seni dan budaya yang sedang berkembang dan membuat perkiraan, memberikan saran dan pertimbangan sebagai bahan untuk menetapkan kebijakan atau mengambil keputusan dan Mengadakan komunikasi, konsultasi dan kerjasama dengan unsur pemerintah daerah dan instansi lain maupun badan – badan swasta dalam usaha melaksanakan tugas pokok sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

2) Sekretaris

Sekretaris mempunyai tugas melaksanakan penyusunan program dan perangkat perundang-undangan, pengembangan kapasitas SDM dan kelembagaan, serta urusan administrasi umum yang meliputi pengolahan kepegawaian, keuangan, perlengkapan dan kerumah tanggaan, pengkoordinasian urusan tata usaha, rumah tangga, perlengkapan, hukum organisasi dan tata laksana, dan urusan lain yang berhubungan dengan kegiatan Badan, Pelaksanaan urusan kepegawaian, pendidikan dan pelatihan, Pelaksanaan tata usaha keuangan, tata usaha persuratan, dan tata usaha kepegawaian.

Sekretaris membawahi:

a) Subbagian Umum dan Perlengkapan

Subbagian Umum dan Perlengkapan mempunyai Melaksanakan urusan surat menyurat, kearsipan, ekspedisi, pengadaan surat, rumah tangga, administrasi perjalanan dinas, peralatan dan perlengkapan dan pelaksanaan kantor serta inventarisasi, Melakukan penyelenggaraan rapat rutin kantor dan evaluasi pelaksanaan tata aturan kedinasan, Memberikan saran dan pertimbangan tentang langkah- langkah yang perlu diambil atasan dalam bidang tugasnya.

b) Subbidang kepegawaian dan Keuangan

Kepala Subbidang kepegawaian dan keuangan, mempunyai tugas : melakukan penyelenggaraan administrasi kepegawaian meliputi penyusunan data, penyajian informasi, pelaksanaan tata usaha kepegawaian dan evaluasi dan pelaporan kepegawaian, membantu bagian tata usaha melakukan penyelenggaraan administrasi keuangan dan perbendaharaan, melaksanakan kegiatan keuangan meliputi pembayaran gaji serta tunjangan kesejahteraan lainnya, administrasi anggaran rutin dan kegiatan keuangan lainnya, menyusun laporan keuangan, menghimpun dan mengolah pelaporan keuangan pembangunan, membantu kepala bagian tata usaha dalam pemeriksaan kas dan keuangan pembangunan.

3) Bidang Perencanaan dan Program

Bidang perencanaan dan program mempunyai tugas melaksanakan perumusan kebijakan dibidang penyusunan rencana program pembangunan, pengendalian, monitoring dan evaluasi serta statistik dan pelaporan, penyelenggaraan penyusunan program sektoral maupun regional, pelaksanaan data statistik pariwisata dan seni budaya

Bidang Perencanaan dan Program membawahi:

a) Kepala Sub Bidang Perencanaan dan Penyuluhan Program

Sub Bidang Perencanaan dan Penyuluhan Program mempunyai tugas menyusun rencana dan program kerja anggaran tahunan dalam bidang pembangunan wisata, gedung kesenian dan kebudayaan,

menyiapkan bahan penyusunan naskah petunjuk RPJM RKA, SKPD dan mendistribusikan setelah mendapat persetujuan dari Kepala Badan, melaksanakan koordinasi dengan Badan, Dinas Pariwisata Kabupaten/ Kota, melaksanakan tugas integrative (lintas sektor) antar Dinas/ Badan se Provinsi Sumatera Selatan.

b) Sub bidang Monitoring dan Evaluasi

Sub bidang Monitoring dan Evaluasi mempunyai tugas mengkoordinasikan kegiatan dengan seksi statistik dan pelaporan guna menyiapkan evaluasi program kerja triwulan, semester dan tahunan, menghimpun, menyusun, mensistematisasikan data pelaksanaan program kerja di bidang pembangunan wisata dan seni budaya.

4) Bidang Bimbingan Masyarakat dan Pengembangan Sumber daya manusia (SDM)

Bidang bimbingan masyarakat mempunyai tugas menyusun program dan melaksanakan kerjasama baik dalam maupun luar negeri, menyusun dan mengarahkan kegiatan – kegiatan promosi dan pemasaran dalam menghadapi era globalisasi, mempromosikan obyek wisata di Kabupaten/ Kota.

Bidang Bimbingan Masyarakat dan pengembangan Sumber Daya Manusia membawahi:

a) Sub bidang Penyuluhan dan pelatihan

Sub bidang Penyuluhan dan pelatihan mempunyai fungsi mengkoordinasikan urusan penyuluhan, pelatihan kebudayaan

kepariwisataan, menilai prestasi kerja bawahan sebagai bahan pembinaan dan pengembangan karier, mengumpulkan, meneliti, mengelola dan memiliki data pegawai untuk pelatihan dan penyuluhan kebudayaan dan kepariwisataan, menyusun laporan pelaksanaan penyuluhan dan pelatihan dalam rangka peningkatan sumber daya manusia

b) Sub bidang pengembangan potensi Alam

Sub bidang pengembangan potensi Alam mempunyai tugas menginventarisasikan, mengidentifikasi dan meng evaluasi potensi pariwisata, menyusun perencanaan Study pengembangan potensi pariwisata, menyiapkan bahan promosi peluang investasi usaha di bidang pariwisata, menyiapkan bahan penelitian potensi pariwisata

5) Bidang Pariwisata dan Promosi

Bidang pariwisata promosi dan pelayanan mempunyai tugas melaksanakan urusan pengembangan potensi, usaha sarana dan jasa pariwisata, usaha obyek dan daya tarik wisata, penciptaan iklim yang menguntungkan bagi pertumbuhan usaha pariwisata dalam rangka penanaman modal

Bidang Pariwisata dan promosi membawahi:

a) Sub bidang Promosi dan Pemasaran

Sub bidang Promosi dan Pemasaran mempunyai tugas mengkoordinasikan urusan promosi dan pemasaran pariwisata dalam

dan luar negeri, melaksanakan kegiatan promosi dan bimbingan masyarakat, menganalisis peluang pasar

b) Sub bidang Obyek dan Rekreasi

Sub bidang Obyek dan Rekreasi mempunyai tugas menginvestarisasikan dan mengidentifikasi usaha obyek dan daya tarik wisata, menyusun statistic perkembangan usaha obyek dan daya tarik wisata, menyusun skala prioritas pengmbangan obyek dan daya tarik wisata, memproses laporan kegiatan usaha (LKU) obyek dan daya tarik wisata.

6) Bidang Seni dan Kebudayaan

Bidang Seni dan Kebudayaan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Badan Pariwisata dan Seni Budaya yang bertanggung jawab kepada Kepala Badan Pariwisata dan Seni Budaya, penyampaian, perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengembangan dan pelestarian budaya, seni, sejarah dan kepurbakalaan dan perfilman, pembinaan analisis evaluasi dan pelaporan atas pelaksanaan di bidang peningkatan apresiasi seni dan budaya, pemeliharaan, pengembangan dan pemanfaatan peninggalan sejarah, kepurbakalaan dan perfiman, pemberian izin dan rekomendasi kepada pengusaha impresariat (Pertunjukan Atraksi seni dan budaya).

Bidang Seni dan Kebudayaan membawahi

a) Sub bidang Seni dan Budaya

Sub bidang Seni dan Budaya mempunyai tugas memantau dan mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan kegiatan kepada kepala Bidang Seni dan Budaya, meningkatkan koordinasi dengan organisasi kesenian dan instansi terkait dalam bidang seni dan kebudayaan, menginventarisasikan sanggar atau organisasi kesenian yang akan di promosikan ke tingkat Nasional dan Internasional.

b) Sub bidang sejarah dan kepurbakalaan

Sub bidang sejarah dan kepurbakalaan mempunyai tugas menyusun rencana dan program di bidang tugasnya, mengumpulkan, menyusun dan mengolah data tentang peninggalan sejarah dan kepurbakalaan.

c. Visi dan Misi Dinas Pariwisata dan Seni Budaya Kabupaten OKU Timur

1. Visi Dinas Pariwisata dan Seni Budaya Kabupaten OKU Timur

“Terwujudnya pariwisata dan seni budaya Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur sebagai daerah yang berbudaya, berakhlak, berwawasan nasional dan sadar wisata”.

Adalah gambaran masyarakat Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur dimasa depan dimana masyarakat OKU Timur dapat mengembangkan pariwisata dan seni budaya secara sadar dan dapat

bersaing dnegan daerah lain serta dapat menjaga lingkungan dan kebudayaan yang dimiliki.

2. Misi Dinas Pariwisata dan Seni Budaya Kabupaten OKU Timur

- a) Meningkatkan upaya pelestarian dan pengembangan seni budaya
- b) Meningkatkan kualitas SDM pelaku Pariwisata dan Seni Budaya
- c) Meningkatkan kualitas sarana dan prasarana pariwisata dan seni budaya
- d) Meningkatkan pengembangan objek dan daya tarik wisata
- e) Meningkatkan SDM dalam sadar lingkungan, sadar wisata dan sadar hukum
- f) Meningkatkan popularitas objek dan daya tarik wisata beserta fasilitas penunjangnya.

d. Aktivitas

Program kegiatan yang sudah dan akan dilaksanakan oleh SKPD Dinas pariwisata dan Seni Budaya Kabupaten OKU Timur pada tahun 2015 terdiri dari 7 (Tujuh) program.

Program tersebut, terdiri dari

1. Pelayanan adminsitrasi perkantoran
2. Program Peningkatan sarana dan prasarana
3. Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan.
4. Program Pengembangan Nilai Budaya

5. Program Pengelolaan Keragaman Budaya
6. Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata
7. Program Pengembangan Kemitraan

i. Tujuan dan Sasaran organisasi

Sasaran organisasi yang ditetapkan pada dasarnya merupakan bagian dari perencanaan dengan fokus utama berupa tindakan pengalokasian sumber daya organisasi ke dalam strategi organisasi. Oleh karenanya penetapan sasaran harus memenuhi kriteria *specific, measurable, aggressive but attainable, result oriented and time bond*.

Sasaran yang dikehendaki:

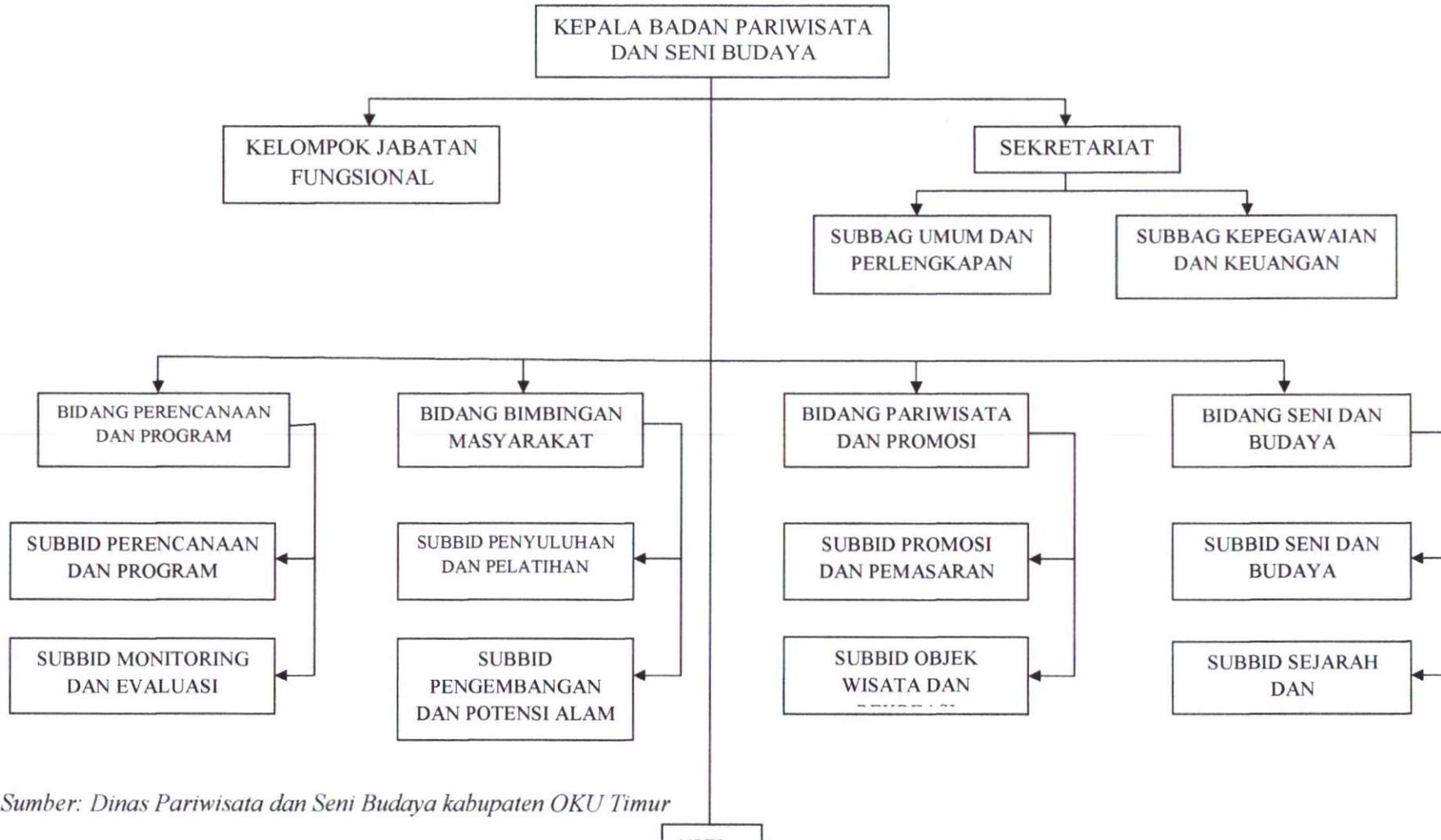
- 1) Pengembangan pariwisata berbasis masyarakat
- 2) Menggali, mengembangkan, melestarikan potensi seni dan budaya serta peningkatan kualitas SDM / Pelaku bidang kepariwisataan / kesenian dan kebudayaan.
- 3) Peningkatkan kualitas seni dan budaya melalui pembinaan terhadap pelaku dan pemenuhan sarana dan prasarananya.
- 4) Meningkatkan koordinasi dengan pihak-pihak yang terkait untuk menciptakan lingkungan yang kondusif, iklim usaha yang baik dan terwujudnya Sapta Pesona
- 5) Meningkatkan penyelenggaraan peristiwa/event pariwisata yang berkualitas.

Tujuan yang dikehendaki adalah :

- 1) Terlaksananya sapta pesona pariwisata
- 2) Terwujudnya masyarakat akan sadar wisata
- 3) Terwujudnya peningkatan ekonomi untuk masyarakat
- 4) Terwujudnya kenyamanan perjalanan bagi wisatawan
- 5) Terjaganya seni budaya dan adat istiadat OKU TIMUR
- 6) Terwujudnya peningkatan arus kunjungan wisatawan
- 7) Terwujudnya pelayanan wisatawan yang prima

F. Struktur Organisasi Badan Pariwisata dan Seni Budaya Kabupaten OKU Timur

Gambar IV.1
Struktur Organisasi Dinas Pariwisata Dan
Seni Budaya Kabupaten OKU Timur



Sumber: Dinas Pariwisata dan Seni Budaya kabupaten OKU Timur

f. Data Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)

Tabel IV.2

**Dinas Pariwisata dan Seni Budaya Kabupaten OKU Timur
Laporan Pengukuran Kinerja Kegiatan Tahun 2014 s/d 2015**

Program	Tahun 2014			Tahun 2015		
	Rencana Tingkat Capaian (target)(Rp)	Realisasi (Rp)	%	Rencana Tingkat Capaian (target)(Rp)	Realisasi (Rp)	%
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Rp. 388.267.000	Rp. 350.837.717	90,35 %	Rp. 387.685.000	Rp.354.213.759	91,36 %
Program Program Peningkatan sarana dan prasarana	Rp. 195.451.500	Rp. 171.434.000	87,71 %	Rp. 81.932.000	Rp. 81.338.700	99,27 %
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Rp. 23.298.000	Rp. 23.298.000	100%	Rp. 25.000.000	Rp. 25.000.000	100 %
Program Pengembangan Nilai Budaya	Rp.1.493.103.400	Rp.1.477.036.000	98,92%	Rp. 280.205.000	Rp.278.705.000	99,46%
Program Pengelolaan Keragaman Budaya	Rp. 841.497.000	Rp. 584.162.000	69,41 %	Rp. 208.187.000	Rp.207.837.000	99,83 %
Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata	Rp.805.000.000	Rp. 802.000.000	99,62%	Rp. 347.521.731	Rp. 335.640.730	96,58%
Program Pengembangan Kemitraan	Rp. 139.999.600	Rp. 136.594.000	97,56 %	Rp. 58.825.000	Rp. 58.825.000	100 %

Program Pengembangan kerjasama pengelolaan kekayaan budaya	Rp. 298.355.000	Rp. 73.355.000	24,58 %	-	-	-
Program Pengelolaan Kekayaan Budaya	Rp 95.000.000	Rp. 71.500.000	75,26%	-	-	-
	Rp.4.279.971.500	Rp.3.690.216.717	86,22%	Rp.1.389.355.731	Rp.1.341.560.189	96,55%

Sumber: Dinas Pariwisata dan Seni Budaya kabupaten OKU Timur

Tabel IV.3
Dinas Pariwisata dan Seni Budaya Kabupaten OKU Timur
Laporan Akuntabilitas Keuangan Tahun 2015

PROGRAM	KEGIATAN	PAGU DANA (Rp)	REALISASI DANA	%
Pelayanan Administrasi Perkantoran	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	29.760.000	15.206.977	51,09%
	Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah	7.500.000	7.500.000	100%
	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas / operasional	2.100.000	397.050	18,90%
	Penyediaan jasa administrasi keuangan	69.018.000	60.478.000	87,62%
	Penyediaan jasa kebersihan kantor	12.000.000	12.000.000	100%
	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	18.500.000	18.500.000	100%
	Penyediaan Alat tulis kantor	50.000.000	50.000.000	100%
	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	18.000.000	17.999.432	99%
	Penyediaan komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor	13.200.000	13.200.000	100%
	Penyediaan peralatan rumah tangga	10.307.000	10.307.000	100%
	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	3.300.000	3.300.000	100%
	Penyediaan makanan dan minuman	15.000.000	15.000.000	100%
	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi kedalam / luar daerah	40.000.000	35.525.300	88,81%

	Penyediaan jasa pendukung administrasi / teknis perkantoran	99.000.000	94.800.000	95,75%
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	17.262.000	17.262.000	100%
	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	39.670.000	39.669.400	99%
	Pemeliharaan rutin / berkala peralatan gedung kantor	25.000.000	24.457.300	97,82%
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	10.000.000	10.000.000	100%
	Penyusunan pelaporan keuangan semesteran	15.000.000	15.000.000	100%
Program Pengembangan Nilai Budaya	Pelestarian dan aktualisasi adat budaya daerah	280.205.000	278.705.000	99,46%
Program Pengelolaan Keragaman Budaya	Fasilitasi perkembangan keragaman budaya daerah	79.000.000	78.650.000	99,55%
	Fasilitasi penyelenggaraan festival budaya daerah	104.187.000	104.187.000	100%
	Monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pengembangan keanekaragaman budaya	25.000.000	25.000.000	100%
Program Pengembangan Kemitraan	Pengembangan sumber daya manusia dan profesionalisme bidang pariwisata	58.825.000	58.825.000	100%
Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata	Pengembangan jaringan kerjasama promosi pariwisata	207.200.000	207.200.000	100%
	Pelaksanaan promosi pariwisata nusantara didalam dan diluar negeri	140.321.731	128.440.730	91,53%
JUMLAH		1.041.834.000	1.341.610.189	77,65%

Sumber: Dinas Pariwisata dan Seni Budaya kabupaten OKU Timur

B. PEMBAHASAN

Sesuai dengan permasalahan yang penulis ajukan maka permasalahan dari penelitian ini adalah bagaimana pelaksanaan laporan akuntabilitas kinerja pada Dinas Pariwisata dan Seni Budaya Kabupaten OKU Timur. LAKIP pada Dinas Pariwisata dan Seni Budaya Kabupaten OKU Timur menunjukkan bahwa secara keseluruhan telah berjalan dengan cukup baik, Penelitian yang membahas tentang Analisis Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada Dinas Pariwisata dan Seni Budaya Kabupaten OKU Timur berikut terdapat data-data terkait kebijakan, program, dan kegiatan yang dilakukan. Secara keseluruhan Dinas Pariwisata dan Seni Budaya Kabupaten OKU Timur telah dapat melaksanakan pelayanan umum , baik kegiatan yang bersifat administrasi ketatausahaan maupun yang bersifat teknis. .

1) Analisis Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Pariwisata dan Seni Budaya Kabupaten OKU Timur

a. Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

Akuntabilitas tidak hanya terbatas pada bidang keuangan saja, melainkan kinerja secara keseluruhan. Kepedulian Pemerintah pada akuntabilitas kinerja ditandai dengan dikeluarkannya Instruksi Presiden no 7 tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Dengan mengacu pada Inpres tersebut, Dinas Pariwisata dan Seni Budaya Kabupaten OKU Timur menyusun LAKIP dan membuat rencana strategis Dinas Pariwisata dan Seni Budaya Kabupaten OKU Timur tahun 2014-2018.

Berikut hasil analisis laporan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada Dinas Pariwisata dan Seni Budaya Kabupaten OKU Timur penulis akan melakukan analisis pada beberapa komponen yaitu: perencanaan strategis, perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan dan evaluasi kinerja dan juga dari hasil analisis berdasarkan pengamatan dan pemahaman penulis atas wawancara yang dilakukan dengan Bapak Amir Hasan, SE dan Bapak Edi Susanto, SE selaku Pelaksana pada Subbagian Umum, Ibu Uswatun Hasanah selaku Staf Bendahara.

1. Perencanaan Strategis (Renstra)

Salah satu bagian terpenting dalam Laporan Akuntabilitas Kinerja Dinas Pariwisata dan Seni Budaya Kabupaten OKU Timur adalah adanya Rencana Strategis sebagai acuan target kinerja. Renstra Dinas Pariwisata dan Seni Budaya Kabupaten OKU Timur disusun untuk jangka waktu lima tahun yaitu tahun 2016-2018. Di dalam Renstra Dinas Pariwisata dan Seni Budaya Kabupaten OKU Timur telah terdapat Pernyataan Visi dan Misi, Tujuan dan Sasaran Organisasi, Arah Kebijakan, Program dan Kegiatan Pokok. Yang tidaktercantum adalah Kondisi awal, Sistem Pemantauan dan Evaluasi.

Seperti yang dikemukakan oleh Bapak Amir Hasan, S.E. selaku Pelaksana seksi Subbagian Umum pada Dinas Pariwisata dan Seni Budaya Kabupaten OKU Timur:

“... yo, renstra itu dibuat tahun 2015 mengacu pada pusat. Kan itu untuk 5 (lima) tahun kan kalau renstra. Tapi sasaran strategisnya bisa beda tiap tahunnya...”

Dari segi unsur-unsur yang ada, Renstra Dinas Pariwisata dan Seni Budaya Kabupaten OKU Timur sudah cukup lengkap sebagai acuan kinerja meskipun tidak detail. Rencana Strategis Dinas Pariwisata dan Seni Budaya Kabupaten OKU Timur tidak berbentuk dokumen yang utuh sebagai dokumen renstra selayaknya. Di dalamnya tidak ada gambar atau tabel, misalnya gambar mengenai tantangan, gambar kondisi sarana dan prasarana, dan gambar siklus perencanaan dan evaluasi.

Selain itu, terjadi ketidakjelasan mengenai hubungan antara program, kegiatan, dan ukuran kinerja. Tidak dijelaskan mengenai hubungan satu persatu antara ukuran kinerja dengan program dan kegiatan. Sehingga banyak program dan kegiatan yang tidak ada hubungannya dengan ukuran kinerja dan sebaliknya banyak ukuran kinerja yang tidak jelas program dan kegiatannya.

Inti dari Renstra adalah capaian kinerja yang dijadikan acuan kinerja Dinas Pariwisata dan Seni Budaya Kabupaten OKU Timur pada setiap tahun. Capaian kinerja tersebut yaitu:

Capaian Kinerja 1: Pelayanan administrasi perkantoran

- a) Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik tercapai 51,09%
- b) Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah tercapai 100% (6 unit)

- c) Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas operasional tercapai 18,90%
- d) Penyediaan jasa administrasi keuangan tercapai 87,62%
- e) Penyediaan jasa kebersihan kantor tercapai 100%
- f) Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja tercapai 100%
- g) Penyediaan alat tulis kantor tercapai 100%
- h) Penyediaan barang cetakan dan penggandaan tercapai 99%
- i) Penyediaan komponen instalasi listrik penerangan bangunan kantor tercapai 100%
- j) Penyediaan peralatan rumah tangga tercapai 100%
- k) Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan tercapai 100%
- l) Penyediaan makanan dan minuman tercapai 100%
- m) Rapat-rapat koordinasi ke dalam /luar daerah tercapai 88,81%
- n) Penyediaan jasa pendukung administrasi / teknis perkantoran tercapai 95,75%

Capaian Kinerja 2: Program Peningkatan sarana dan prasarana

- a) Pemeliharaan rutin / berkala gedung kantor tercapai 100%
- b) Pemeliharaan rutin / berkala kendaraan dinas / operasional tercapai 99%
- c) Pemeliharaan rutin / berkala peralatan gedung kantor tercapai 97,82%

Capaian Kinerja 3: Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan.

a) Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi SKPD tercapai 100%

b) Penyusunan laporan keuangan semesteran tercapai 100%

Capaian Kinerja 4: Program Pengembangan Nilai Budaya

a) Pelestarian dan aktualisasi adat budaya daerah tercapai 99,46%

Capaian Kinerja 5: Program Pengelolaan Keragaman Budaya

a) Fasilitasi perkembangan keragaman budaya daerah tercapai 99,55%

b) Fasilitasi penyelenggaraan festival budaya daerah tercapai 100%

c) Monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pengembangan keanekaragaman budaya tercapai 100%

Capaian Kinerja 6: Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata

a) Pengembangan jaringan kerjasama promosi pariwisata tercapai 100%

b) Pelaksanaan promosi pariwisata nusantara di dalam dan di luar negeri tercapai 91,53%

Capaian Kinerja 7: Program Pengembangan Kemitraan

a) Pengembangan sumber daya manusia dan profesionalisme bidang pariwisata tercapai 100%

Sayangnya, ukuran-ukuran kinerja tersebut tidak dijelaskan mengacu pada program dan kegiatan yang mana, yang berakibat sangat sulitnya untuk membuat pencapaian kinerja organisasi pada penyusunan LAKIP. Selain itu, ukuran kinerja tersebut tergabung antara ukuran output dan ukuran outcome. Output adalah keluaran dari setiap program

dan kegiatan yang dilaksanakan, sedangkan outcome merupakan hasil dari program dari kegiatan tersebut.

Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik merupakan ukuran kinerja outcome, sedangkan jumlah Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah yang tersedia merupakan ukuran output. jasa jaminan barang milik daerah langsung dapat diukur pada berakhirnya masa tahun anggaran. Sedangkan Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik tidak bisa langsung didapatkan hasilnya. Dinas Pariwisata dan Seni Budaya harus melakukan pendataan terlebih dahulu jika ingin mengetahui capaian hasil jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik.

2. Program Kerja

Sebagai turunan dari renstra, Dinas Pariwisata dan Seni Budaya Kabupaten OKU Timur membuat Program Kerja untuk setiap tahun. Program Kerja tahunan juga mengacu pada Renstra dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP). Saat ini Dinas Pariwisata dan Seni Budaya Kabupaten OKU Timur telah memiliki dokumen Program Kerja Tahun 2015 yang berisi capaian kinerja, uraian kegiatan dan hasil dari *input*, *output*, dan *outcome*.

Pada Program Kerja Dinas Pariwisata dan Seni Budaya Kabupaten OKU Timur membuat daftar Program dan Kegiatan yang akan dilakukan pada tahun 2015, namun tidak jelas perbedaan makna dan penggunaan antara program dan kegiatan. Pada bab tersebut, istilah

“program” dan ”kegiatan” digunakan secara tumpang tindih serta tidak konsisten. Kegiatan-kegiatan utama ada yang disandingkan dengan istilah program.

Kegiatan-kegiatan yang dituliskan tersebut tidak dikelompokkan berdasarkan turunan dari Visi, Misi, Tujuan, dan sasaran Dinas Pariwisata dan Seni Budaya Kabupaten OKU Timur. Hal ini mengakibatkan terjadi ketidakjelasan antara program dan kegiatan dengan capaian hasil yang ingin dicapai, Sebagai contoh pada dokumen Program Kerja ditulis Program pelayanan administrasi perkantoran sedangkan ditulis adalah Kegiatan Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik.

3. Pengukuran Kinerja

Menurut Pedoman Penyusunan dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi pemerintah, pengukuran kinerja digunakan sebagai dasar untuk menilai keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan. Pengukuran kinerja yang dilakukan oleh Dinas Pariwisata dan Seni Budaya Kabupaten Oku Timur yang terlampir dalam LAKIP dan berisi sasaran strategis, uraian Indikator kinerja, target dari masing-masing indikator kinerja, realisasi dari masing-masing indikator kinerja, angka persentase pencapaian target dari masing-masing Indikator kinerja, jumlah anggaran program, dan jumlah realisasi anggaran program sesuai kontrak kinerja. Seperti yang dikemukakan oleh Bapak Amir Hasan S.E selaku Pelaksana seksi

Subbagian Umum Dinas Pariwisata dan Seni Budaya Kabupaten OKU Timur:

“...Kito ambil kontrak kinerja, otomatis kontrak kinerja kepala Dinas Pariwisata dan Seni Budaya Kabupaten OKU Timur harus mencakup pekerjaan semua seksi yang ada disini, jangan sampai ada yang terlewat nanti dak terhitung kinerjanya. Jadi didalam kontrak kinerja kepala Dinas Pariwisata dan Seni Budaya Kabupaten OKU Timur terdapat 10 (sepuluh) sasaran strategis itu ditahun 2014 dan ditahun 2015 cuma 8 (delapan), dak tahu ngapo semakin sedikit padahal gaweannyo jugo banyak, itulah gawean dari tiap seksi yang ada disini yang harus diukur setiap satu tahun. Dari 8 itu diambillah misalnya, 4 untuk subbagian umum, 4 untuk seksi bidang Seni dan Budaya , sehingga jumlahnya 8. Jadi pekerjaan terbagi, jadi dibolak balik dapat, diturunkan kebawah pekerjaan terbagi semua, dinaikan keatas juga nilainya terbawa semua, kalau pelaksana mengisi target capaiannya 90% maka di kepala seksi juga sama, tidak mungkin jadi 100% dan targetnya sudah ditetapkan pusat...”

Hal tersebut juga dikemukakan oleh Ibu Fatimah, S.Sos. Selaku Sekretariat pada Dinas Pariwisata dan Seni Budaya Kabupaten OKU Timur:

“...Nilai persentase dalam capaian indikator kinerja di LAKIP itu ada cara perhitungannya sendiri sesuai tata cara penghitungan indikator

kinerja, bukan perhitungan secara matematika begitu saja. sehingga terlihat capaian dari target...”

Berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat di ambil kesimpulan bahwa Dinas Pariwisata dan Seni Budaya Kabupaten OKU Timur ini sudah melaksanakan pengukuran kinerja dengan baik sehingga dapat menyajikan persentase tingkat pencapaian dari target yang telah ditentukan sesuai regulasi yang ditentukan untuk mewujudkan tujuan suatu instansi.

4. Pelaporan dan Evaluasi Kinerja

Pada Pedoman Penyusunan dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi ditulis bahwa pelaporan kinerja yang digunakan dalam sektor publik di Indonesia adalah LAKIP. LAKIP dipakai sebagai media akuntabilitas bagi instansi pemerintah. Pelaporan dan evaluasi kinerja Dinas Pariwisata dan Seni Budaya Kabupaten OKU Timur disajikan dalam bentuk Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) yang disusun dan dilaporkan secara periodik. Seperti yang dikemukakan oleh Bapak Amir Hasan, S.E. selaku Pelaksana seksi Subbagian Umum Dinas Pariwisata dan Seni Budaya Kabupaten OKU Timur:

“...sebenarnya kan kayak ini, bagus atau idaknya LAKIP dak ada masalah, itu udah ada ketentuan dibuat tiap tahunnya tapi keadaannya kita nunggu petunjuk teknisnya, nunggu diobrak-obrak dulu ayo cepet dibuat, terakhir tgl sekian bulan sekian, baru lah kita buat cepet-cepet

kalau sudah ada suratnya itu. Tapi penyusunan LAKIP bisa disusun cepat karena sudah ada filenya, tinggal mengganti saja realisasi dan apa-apanya. Seperti penyampaian LAKIP 2014 kemarin yang selesai 7 hari setelah surat itu diterima. Kalau LAKIP sendiri dak ada pemeriksaan seperti laporan keuangan, hanya dilakukan monitoring, sudah buat atau tidak, secara berjenjang dari Kanwil maupun pusat...”

Hal tersebut juga dikemukakan oleh Bapak Edi Susanto, S.E selaku Pelaksana seksi Subbagian Kepegawaian dan keuangan Dinas Pariwisata dan Seni Budaya Kabupaten OKU Timur:

“...Menyusun LAKIP untuk pelaporan tidak memerlukan waktu yang lama, kirakira bisa dikerjakan satu minggu kalau memang pekerjaan juga sedang banyak, tapi sebenarnya juga bisa lebih cepat dari itu kalau tidak sedang repot, karena data yang dibutuhkan sudah ada, tinggal minta dari teman-teman saja lalu dimasukkan dalam format file yang sudah ada. Kalau pemeriksaan untuk LAKIP sepertinya setahu saya tidak ada...”

Berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat di ambil kesimpulan bahwa Dinas Pariwisata dan Seni Budaya Kabupaten OKU Timur telah melaksanakan kewajiban pelaporan kinerja sesuai dengan ketentuan yang ada dan digunakan dalam mencapai tujuan suatu instansi. Meskipun pelaporan LAKIP Dinas Pariwisata dan Seni Budaya Kabupaten OKU Timur sendiri masih dianggap hanya sebagai bentuk formalitas saja, karena tidak ada pemeriksaan yang dilakukan dalam LAKIP, hanya dilakukan

monitoring secara berjenjang dari Kanwil maupun pusat. Berdasarkan uraian diatas dapat penulis simpulkan bahwa Dinas Pariwisata dan Seni Budaya Kabupaten OKU Timur telah memahami dengan baik laporan akuntabilitas kinerja sesuai dengan regulasi yang telah ditetapkan . yang telah menjelaskan dan menjawab wawancara yang dilakukan oleh penulis dengan baik

Berdasarkan uraian diatas dapat penulis simpulkan bahwa Dinas Pariwisata dan Seni Budaya Kabupaten OKU Timur telah melaksanakan dengan baik sistem akuntabilitas kinerja sesuai dengan regulasi yang telah ditetapkan. Hal tersebut dapat dinilai dari pemahaman pejabat dan pegawai Dinas Pariwisata dan Seni Budaya Kabupaten OKU Timur sebagai aparat terkait, yang telah menjelaskan dan menjawab wawancara yang dilakukan oleh penulis dengan baik mengenai pelaksanaan LAKIP Dinas Pariwisata dan Seni Budaya Kabupaten OKU Timur , dan dalam proses tersebut juga mengindikasikan adanya komponen kesatuan yang ada pada SAKIP.

2) Analisis Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada Dinas Pariwisata dan Seni Budaya Kabupaten OKU Timur berdasarkan Peraturan menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: 29 Tahun 2010

Dinas Pariwisata dan Seni Budaya Kabupaten OKU Timur menyajikan LAKIP sebagai wujud pertanggungjawaban terhadap pemberi amanah dalam hal ini bupati OKU Timur sebagai instrumen pertanggungjawaban kepada masyarakat selaku “*stake holder*” utama wilayah

kabupaten OKU Timur, maka Dinas Pariwisata dan Seni Budaya Kabupaten OKU Timur membuat LAKIP. Sebagaimana juga diutarakan oleh Edi Susanto SE, selaku Subbag umum Dinas Pariwisata dan Seni Budaya Kabupaten OKU Timur sebagai berikut :

“LAKIP merupakan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan berbagai program dan kegiatan kepada seluruh *stake holder* yang berkepentingan yang dilaksanakan dalam rangka untuk mencapai visi, misi, tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.”

LAKIP juga berperan sebagai alat kendali, alat pendorong dalam terwujudnya *good governance*, dan alat penilai kualitas kinerja. Hal tersebut dapat dilihat dari pernyataan Amir Hasan S,E selaku subbag umum Dinas Pariwisata dan Seni Budaya Kabupaten OKU Timur :

“Setiap kinerja harus memiliki alat ukur dan kendali, LAKIP merupakan alat ukur kinerja kita yang digunakan sebagai bahan untuk memperbaiki dan meningkatkan kinerja secara berkelanjutan.”

Dalam menyusun dan menyajikan Laporan Akuntabilitas Kinerjanya menurut Dinas Pariwisata dan Seni Budaya Kabupaten OKU Timur sudah sesuai dengan pedoman dalam Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No 29 tahun 2010. Dimana di dalam pasal 16 ayat 1 disebutkan bahwa Laporan Akuntabilitas Kinerja sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 12 berisi ikhtisar pencapaian sasaran sebagaimana yang ditetapkan dalam dokumen penetapan kinerja dan dokumen perencanaan. Dan pelaporan kinerja Dinas Pariwisata dan Seni Budaya Kabupaten OKU

dana yang tidak terpakai bukan berarti bahwa Dinas Pariwisata dan Seni Budaya Kabupaten OKU Timur belum bisa menggunakan dana tersebut secara maksimal namun ada beberapa sub item kegiatan yang memang belum bisa terealisasi serta adanya efisiensi penggunaan anggaran pada sub item tersebut. Semua sisa anggaran nantinya akan dikembalikan secara otomatis ke kas Pemerintah Kabupaten.

Akuntabilitas kinerja organisasi tidak terlepas dari evaluasi kinerja. Evaluasi kinerja merupakan kegiatan untuk menilai atau melihat keberhasilan dan kegagalan manager publik dalam melaksanakan kegiatan dan fungsi yang diamanahkan kepadanya sebagaimana visi dan misi organisasi. Namun dalam pelaksanaannya terdapat hambatan yang di hadapi oleh Dinas Pariwisata dan Seni Budaya Kabupaten OKU Timur tampak dari pernyataan Edi Susanto SE :

“Dalam penyusunan lakip terdapat hambatan yang dihadapi oleh Dinas Pariwisata dan Seni Budaya Kabupaten OKU Timur antara lain kurangnya pengetahuan SDM yang ada, dikarenakan latar belakang pendidikan yang tidak sesuai dan kegiatan yang ada belum sesuai dengan pedoman standar pelayanan minimal yang ditetapkan”.

Namun jika dilihat dari sisi peneliti yang telah melakukan penelitian pada Dinas Pariwisata dan Seni Budaya Kabupaten OKU Timur, LAKIP yang disajikan, belum dapat menggambarkan secara jelas tentang sumber daya keuangan (*input*) yang digunakan untuk melakukan kegiatan dalam mencapai keluaran (*output*), dan hasil (*outcome*), serta dampak dari *outcome*. Karena pada dasarnya Pengukuran kinerja pada organisasi organisasi sektor publik tidak

hanya berdasarkan pada ukuran finansial saja tetapi juga pada ukuran non-finansial karena tujuan utama organisasi ini bukan memperoleh laba melainkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Kinerja organisasi sektor publik yang bersifat multidimensional menyebabkan tidak ada indikator tunggal yang dapat digunakan dalam pengukuran kinerja. Selain itu, *output* yang dihasilkan oleh organisasi sektor publik umumnya bersifat *intangible*, sehingga perlu adanya ukuran non-finansial yang dapat mencerminkan besarnya *output* yang dihasilkan. Relevansi indikator *output* dan *outcome* perlu dikembangkan dengan mempertimbangkan relevansinya tujuan program dan kegiatan.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan narasumber, adapun kelemahan-kelemahan yang ditemukan oleh penulis dalam penelitian ini sebagai berikut:

- 1) Pelaporandan penyampaian LAKIP Dinas Pariwisata dan Seni Budaya Kabupaten OKU Timur yang masih dianggap hanya sebagaibentuk formalitas saja.
- 2) Tidak adanya pemeriksaan dan penilaian yang dilakukan dalam LAKIP.
- 3) Monitoring yang dilakukan secara berjenjang oleh Kanwil maupunpusat hanya sebatas untuk mengetahui LAKIP telah dibuat atau tidak.

BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai analisis laporan akuntabilitas kinerja pada Dinas Pariwisata dan Seni Budaya Kabupaten OKU Timur, maka dapat disimpulkan bahwa LAKIP pada Dinas Pariwisata dan Seni Budaya Kabupaten OKU Timur sudah disajikan belum sesuai dengan pedoman Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No 29 tahun 2010, dimana di dalam pasal 16 ayat 1 disebutkan bahwa Laporan Akuntabilitas Kinerja sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 12 berisi ikhtisar pencapaian sasaran sebagaimana yang ditetapkan dalam dokumen penetapan kinerja dan dokumen perencanaan. namun fakta yang dijumpai peneliti saat melakukan penelitian pada Dinas Pariwisata dan Seni Budaya Kabupaten OKU Timur , pelaksanaan LAKIP yang disajikan belum bisa dikatakan sesuai , sehingga menyulitkan penulis menggambarkan secara jelas tentang sumber daya keuangan (*input*) yang digunakan untuk melakukan kegiatan dalam mencapai keluaran (*output*), dan indikator hasil (*outcome*). Relevansi indikator *output* dan *outcome* perlu dikembangkan dengan mempertimbangkan relevansinya tujuan program dan kegiatan.

Akuntabilitas Kinerja Dinas Pariwisata dan Seni Budaya Kabupaten OKU Timur masih sangat lemah karena banyak sekali perbedaan antara dokumen perencanaan dan dokumen laporan kinerja. Terdapat perbedaan antara ukuran kinerja yang tercantum dalam Renstra dan yang digunakan sebagai dasar

laporan kinerja, sehingga tidak bisa diukur keberhasilan maupun kegagalan suatu program dilaksanakan. Penyusunan laporan masih mengacu pada Instruksi Presiden no 7 tahun 1999 yang seharusnya sudah mengacu pada Peraturan Pemerintah nomor 8 tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah dikemukakan sebelumnya, maka penulis akan memberikan saran yang mungkin dapat bermanfaat bagi Dinas Pariwisata dan Seni Budaya Kabupaten OKU Timur yaitu:

- 1) Dalam menghadapi kendala-kendala dalam penyusunan LAKIP, sebaiknya Dinas Pariwisata dan Seni Budaya Kabupaten OKU Timur mulai memperbaiki target-target yang dianggap tidak rasional dan menghambat dalam memperoleh data sehingga menjadi kendala dalam penyusunan LAKIP agar kegiatan yang telah direncanakan dapat tercapai secara keseluruhan.
- 2) Karena dalam penelitian ini peneliti menemukan fakta bahwa Dinas Pariwisata dan Seni Budaya Kabupaten OKU Timur belum dapat menggambarkan secara jelas tentang keluaran (*output*), dan hasil (*outcome*), serta dampak dari *outcome*. Maka untuk selanjutnya diharapkan relevansi indikator *output* dan *outcome* perlu dikembangkan dengan mempertimbangkan relevansinya tujuan program dan kegiatan.
- 3) Penetapan indikator-indikator kinerja yang menjadi tolak ukur keberhasilan/kegagalan perlu diperhatikan. Indikator kinerja harus dapat

terukur dengan jelas misalnya jumlah kegiatan yang dilaksanakan, jumlah pegawai yang mengikuti bimbingan teknis, dan sebagainya sehingga dapat dilihat capaian kinerja apakah sesuai dengan yang direncanakan atau tidak.

- 4) Meningkatkan perbaikan kualitas dan mutu SDM Dinas Pariwisata dan Seni Budaya Kabupaten OKU Timur dengan berbagai pelatihan dan seminar agar kinerja semakin lebih baik lagi, menguasai dan memahami penyajian LAKIP, sehingga dapat menyajikan LAKIP yang lebih sempurna dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ada dan sasaran program kegiatan dapat tercapai.
- 5) Evaluasi menyeluruh terhadap LAKIP baik dari segi penyusunan, tata bahasa serta cara penyajian yang perlu ditingkatkan.

DAFTAR PUSTAKA

- Anonim. 2007. *Akuntabilitas Instansi Pemerintah. Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pengawasan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan*, Jakarta.
- Anonim. 2003. *Pedoman Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Lembaga Administrasi Negara*, Jakarta.
- Erly Putri Mandasari. 2015. Laporan Akuntabilitas Kinerja Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Pasuruan: Perspektif Value For Money, Skripsi Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia (STIESIA) Surabaya. (Tidak Dipublikasikan).
- Indra Bastian. 2006. *Akuntansi Sektor Publik Suatu Pengantar*. Erlangga. Yogyakarta.
- Instruksi Presiden No. 7 Tahun 1999 tentang *Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah*.
- Khalid Faisal. 2010. *Akuntabilitas Keuangan dan Kinerja: Studi Kasus Pada Direktorat Pembinaan SLB*. Skripsi Tidak Diterbitkan. Jakarta: Universitas Indonesia.
- Mardiasmo. 2009. *Akuntansi Sektor Publik*, Andi Yogyakarta. Yogyakarta.
- Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No.29 Tahun 2010 tentang *Pedoman Penyusunan Penerapan Kinerja dan Pelaporan*.
- Peraturan Presiden No 29. Tahun 2014 tentang *Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah*
- Program Strata Satu. 2012. *Pedoman Penulisan Usulan Penelitian dan Skripsi Palembang: Universitas Muhammadiyah Palembang*.
- Sugiono. 2009. *Metode Penelitian Bisnis*. Penerbit Alfabeta, Bandung.
- Sumadya Merry Christina. 2014. Mengungkap Pemahaman Aparatur Terhadap Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Studi Kasus Pada Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Surabaya I). Skripsi Tidak Diterbitkan. Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia (STIESIA) Surabaya
- Susan Susanto. 2013. *Analisis Laporan Akuntabilitas Kinerja pada Dinas Kebudayaan dan pariwisata provinsi Sulawesi Utara*. Skripsi Tidak Diterbitkan. Manado: Program Studi Ekonomi dan Bisnis, Universitas Sam Ratulangi Manado, ISSN 2303-1174.
- Warsini Kusni. 2009. *Analisis Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2007 (Studi Kasus pada Dinas Kesehatan Kabupaten Sukoharjo*. Skripsi Tidak Diterbitkan. Surakarta: Ekonomi Jurusan Akuntansi, Universitas Muhammadiyah Surakarta.
- Ninobalmy. 2009. Definisi Akuntabilitas (online) (<http://tesisdisertasi.blogspot.co.id/2010/05/definisi-akuntabilitas.html>).
- Ridho Pamungkas. 2015. Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi pemerintah (online) <http://pemerintah.net/sistem-akuntabilitas-kinerja-instansi-pemerintah/>

Wawancara dengan Bapak Amir Hasan S.E selaku Subbag Umum Dinas Pariwisata dan Seni Budaya Kabupaten OKU Timur

1. Dalam menyusun LAKIP perlu memperhatikan kualitas kinerja! Bagaimana menurut pendapat Bapak/Ibu?

Jawab: Setiap kinerja itu harus memiliki alat ukur dan kendali, LAKIP kan alat ukur kinerja kita yang digunakan sebagai bahan untuk memperbaiki dan meningkatkan kinerja secara berkelanjutan.

2. Apakah format LAKIP yang dibuat oleh Dinas Pariwisata dan Seni Budaya sudah berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No 29 Tahun 2010?

Jawab: ...ehm, lakip itu format penyusunannya sudah dari pusat, sudah dari sana diberi file contohnya seperti apa, ya seperti itu, memang dak samo dengan lakip kita. Lakipnyo Cuma dibuat untuk formalitas bae soalnya itu kan dimonitoring secara berjenjang dan wajib dibuat lakip itu...

3. Berapa lama waktu yang diperlukan dalam menyusun LAKIP ini?

Jawab: sebenernyo kan kayak ini, bagus atau idaknya LAKIP dak ada masalah, itu udah ada ketentuan dibuat tiap tahunnya tapi keadaannya kayak ini kita nunggu petunjuk teknisnya, nunggu diobrak-obrak dulu ayo cepet dibuat, terakhir tgl sekian bulan sekian, baru lah kita buat cepat-cepat kalau udah ada suratnya itu. Tapi penyusunan LAKIP bisa disusun cepet karena udah ada filenya, tinggal ganti saja realisasi dan apa-apanya. Seperti penyampaian LAKIP 2014 kemarin yang selesai 7 hari setelah surat itu diterima. Kalau LAKIP sendiri tidak ada pemeriksaan seperti laporan keuangan, hanya

dilakukan monitoring, sudah buat atau tidak, secara berjenjang dari Kanwil maupun pusat.

4. Renstra yang dibuat untuk jangka waktu 5 tahun, apakah sasaran strategisnya berbeda atau tidak?

Jawab: iya, renstra itu dibuat tahun 2015 mengacu pada pusat. Kan itu untuk 5 (lima) tahun kan kalau renstra. Tapi sasaran strategisnya bisa beda tiap tahunnya.

Wawancara dengan Bapak Edi Susanto S.E selaku Subbag Umum Dinas Pariwisata dan Seni Budaya Kabupaten OKU Timur

1. Bagaimanakah menurut Bapak/ibu tentang LAKIP!

Jawab: LAKIP itu laporan pertanggungjawaban pelaksanaan program dan kegiatan kepada seluruh *stake holder* yang berkepentingan yang dilaksanakan dalam rangka untuk mencapai visi, misi, tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

2. Apakah terdapat hambatan yang dihadapi oleh Dinas Pariwisata dan Seni Budaya dalam menyusun LAKIP ini?

Jawab: Pasti ada, hambatan yang sering dihadapi oleh Dinas Pariwisata dan Seni Budaya Kabupaten OKU Timur itu antara lain kurangnya pengetahuan SDM yang ada, dikarenakan latar belakang pendidikan yang tidak sesuai dan kegiatan yang ada belum sesuai dengan pedoman standar pelayanan minimal yang ditetapkan.

3. Berapa lama waktu yang diperlukan dalam menyusun LAKIP di Dinas Pariwisata dan Seni Budaya Kabupaten OKU Timur?

Jawab: Menyusun LAKIP untuk pelaporan itu tidak memerlukan waktu yang lama, kira-kira bisa dikerjakan satu minggu kalau memang pekerjaan juga sedang banyak, tapi sebenarnya juga bisa lebih cepat dari itu kalau tidak sedang repot, karena

data yang dibutuhkan sudah ada, tinggal minta dari teman-teman saja. Lalu dimasukkan dalam format file yang sudah ada. Kalau pemeriksaan untuk LAKIP sepertinya setahu saya tidak ada.

Wawancara dengan Ibu Uswatun Hasanah selaku Staff bagian Administrasi Dinas Pariwisata dan Seni Budaya Kabupaten OKU Timur.

1. Masalah apa yang sering menghambat kegiatan administrasi pada Dinas Pariwisata dan Seni Budaya kabupaten OKU Timur?

Jawab: yang sering menghambat pastinya kurangnya tenaga/pegawai administrasi dalam kegiatan administrasi keuangan pada Dinas Pariwisata dan Seni Budaya Kabupaten OKU TIMUR terus Anggaran Dana Bantuan Pagelaran Seni dan Alat Kesenian tidak terserap maksimum karena kurangnya tenaga kerja/pegawai untuk mensurvey proposal-proposal yang masuk dari kelompok-kelompok kesenian di OKU Timur.

PEMERINTAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR
BADAN PARIWISATA DAN SENI BUDAYA
Komplek Perkantoran Pemkab OKU TIMUR Jl. Lintas Sumatera Km. 08 Kotabaru Selatan
MARTAPURA

No : 1031/170/Parsenbud/2016

Palembang, Juni 2016

Perihal : Keterangan Selesai Riset

Kepada Yth:

Bapak Dekan

Universitas Muhammadiyah Palembang

di-

Palembang,

Dengan Hormat,

Assalamu'alaikum wr.wb

Sehubungan dengan telah diselesaikannya penelitian lapangan yang dilakukan pada Badan Pariwisata dan Seni Budaya Kabupaten OKU Timur. Dalam rangka menyelesaikan studi pada Fakultas Ekonomi Muhammadiyah Palembang. Maka Mahasiswa tersebut dibawah ini:

Nama : Padla Aulia Hadiyanti

NIM : 22 2011 170

Jurusan : Akuntansi

Adalah benaryang menyelesaikan dilapangan tersebut.

Demikianlah kami sampaikan, atas kerja sama yang baik kami ucapkan terima kasih.

Kepala Badan Pariwisata dan Seni Budaya
Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur,





UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

LABORATORIUM KOMPUTER



SERTIFIKAT

Nomor : 470/PAK / LAB.. FE UMP/II/ 2015

Diberikan Kepada :

Nama : PADLA AULIA HADIYANTI

Nim : 222011170

Tempat Lahir : PALEMBANG

Tanggal Lahir : 18 AGUSTUS 1993

Nilai :

75	B	MEMUASKAN
----	---	-----------

Peserta Pelatihan Komputer Akuntansi : GENERAL LEDGER EXCEL DAN MYOB FOR ACCOUNTING, yang dilaksanakan dari bulan September 2014 sampai dengan bulan Desember 2014 (14 Kali: 28 Jam) bertempat di Laboratorium Komputer Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Palembang.



Palembang Februari 2015

Dekan

Fauzi Ridwan, SE., MM

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG



Unggul dan Islami

Sertifikat

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

DIBERIKAN KEPADA :

NAMA : PADIA AULIA HADIYANTI
NIM : 222011170
PROGRAM STUDI : Akuntansi

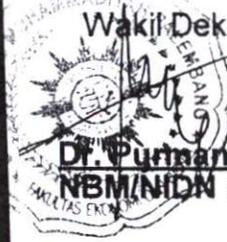
Yang dinyatakan HAFAL / TAHFIDZ (17) Surat Juz Amma
di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Palembang

Palembang, Senin, 25 Juli, 2016
an. Dekan



Wakil Dekan IV

Dr. Purmansyah Ariadi, M.Hum
NBM/NIDN : 731454/0215126902





UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH DALEMBANG
LEMBAGA BAHASA

Jalan Jenderal Ahmad Yani 13 Ulu Palembang 30263

Telp. (0711) 512637 - Fax. (0711) 512637

email. lembagabahasaump@yahoo.co.id



TEST OF ENGLISH ABILITY SCORE RECORD

Name : Padla Aulia Hadiyanti
Place/Date of Birth : Palembang, August 18th 1993
Test Times Taken : +3
Test Date : April, 16th 2016

Scaled Score

Listening Comprehension : 47
Structure Grammar : 41
Reading Comprehension : 39
OVERALL SCORE : 423

Palembang, April, 19th 2016

Head of Language Institute

Rini Susanti, S.Pd., M.A

No. 308/TEA FE/LB/UMP/VI/2016

NBM/NIDN. 1164932/0210098402

123 certificates



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
STATUS TERAKREDITASI

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PIA Q A M

No.509/H-4/LPKKN/UMP/III/2015

Lembaga Pengelola Kuliah Kerja Nyata (LPKKN) Universitas Muhammadiyah Palembang menerangkan bahwa:

Nama : **Padla Aulia Hadiyanti**
Nomor Pokok Mahasiswa : **222011170**
Fakultas : **Ekonomi**
Tempat Tgl. Lahir : **Palembang, 18-08-1993**

Telah mengikuti Kuliah Kerja Nyata Tematik Posdaya Angkatan ke-8 yang dilaksanakan dari tanggal 21 Januari sampai dengan 5 Maret 2015 bertempat di:

Kelurahan/Desa : **Tanjung Menang**
Kecamatan : **Kayuagung**
Kota/Kabupaten : **Ogan Komering Ilir**
Dinyatakan : **LULUS**

Mengetahui
Rektor

Dr. H. M. Idris, S.E., M.Si.



Palembang, 30 Maret 2015

Ketua LPKKN,

Ir. Alhanannasir, M.Si.

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

PROGRAM STUDI
STUDI MANAJEMEN (S1)
STUDI AKUNTANSI (S1)
STUDI MANAJEMEN PEMASARAN (D3)

Nomor : 027 /SK/BAN-PT/Akred /I /T/ / 2014 (B)
Nomor : 044 /SK/BAN-PT/Akred /I /T/ / 2014 (B)
Nomor : 1262 /SK/BAN-PT/Akred /I /XII / 2015 (B)
Nomor : 771 /SK/BAN-PT/Akred /I /T/ / VII / 2015 (B)

Website

Email : febumplg@um-palembang.ac.id

Alamat

Jalan Yani 13 Ulu Palembang 30263 Telp. (0711)511433 Faximile (0711) 518018



LEMBAR PERSETUJUAN PERBAIKAN SKRIPSI

Hari/Tanggal : Senin, 07 Februari 2017
Waktu : 13.00 s/d 17.00 WIB
Nama : Padla Aulia Hadiyanti
Nim : 222011170
Program Studi : Akuntansi
Mata Kuliah Pokok : Akuntansi Sektor Publik
Judul Skripsi : ANALISIS LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA PADA
DINAS PARIWISATA DAN SENI BUDAYA KABUPATEN
OKU TIMUR

**TELAH DIPERBAIKI DAN DIPERSETUJUI OLEH TIM PENGUJI DAN
PEMBIMBING SKRIPSI DAN DIPERKENANKAN
UNTUK MENGIKUTI WISUDA**

NAMA DOSEN	JABATAN	TANGGAL PERSETUJUAN	TANDA TANGAN
Muhammad Fahmi, S.E, M.Si	Pembimbing	14 Maret 2017	
H.M. Basyaruddin R, S.E, Ak., M.Si, CA	Ketua Penguji	10 Maret 2017	
Rosalina Ghazali, S.E, Ak., M.Si	Penguji I	9 Maret 2017	
Muhammad Fahmi, S.E, M.Si	Penguji II	8/3 2017	

Palembang, Maret 2017
Dekan

u.b Ketua Program Studi Akuntansi



Betri Sirajuddin, S.E, M.Si., Ak., CA
NIDN/NBM:0216106902/944806



بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

KARTU AKTIVITAS BIMBINGAN SKRIPSI

IA MAHASISWA : Padla Aulia Hadiyanti	PEMBIMBING
: 22 2011 170	KETUA Muhammad Fahmi, S.E., M.Si
GRAM STUDI : Akuntansi	ANGGOTA :
JUL SKRIPSI : Analisis Laporan Akuntabilitas Kinerja Pada Dinas Pariwisata Dan Seni Budaya Kabupaten Oku Timur	

TGL/BL/TH KONSULTASI	MATERI YANG DIBAHAS	PARAF PEMBIMBING		KETERANGAN
		KETUA	ANGGOTA	
9 Januari 2017	bab 1, 2, 3.	<i>Mf</i>		tidak
12 Jan 2017	bab 2 & 3	<i>Mf</i>		tidak
26 Jan 2017	bab 2 & 3	<i>Mf</i>		tidak!
3 Feb 2017	Analisa bab	<i>Mf</i>		tidak
7 Feb 2017	Analisa bab All.	<i>Mf</i>		tidak lengkap

TAN :

Mahasiswa diberikan waktu menyelesaikan skripsi, bulan terhitung sejak tanggal ditetapkan

Dikeluarkan di : Palembang

Pada tanggal : / /

a.n. Dekan

Program Studi :

Betri Sirajuddin

Betri Sirajuddin, S.E., M.Si., Ak., CA



BIODATA PENELITI

Nama : Padla Aulia Hadiyanti
Nim : 22 2011 170
Jenis Kelamin : Perempuan
Tempat/TglLahir : Palembang, 18 Agustus 1993
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
AlamatLengkap : Jln. Sumatera Blok C3 No.2995 Komp Pusri Borang Perumnas
Nama Ayah : Kgs. H. M Ali
Nama Ibu : Nyimas Hj Halimah
Nomor Telpon/Hp : 08980857532
E-mail : Padlaaulia@yahoo.com